

**PERANAN DEMOGRAFI DAN MODAL SOSIAL DALAM
MENGUATKAN PERSEPSI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN MENGGUNAKAN
*SECOND ORDER ANALYSIS***

Tesis

Oleh

**NANDA KURNIASARI
NPM 2224151001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

**PERANAN DEMOGRAFI DAN MODAL SOSIAL DALAM
MENGUATKAN PERSEPSI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN MENGGUNAKAN
*SECOND ORDER ANALYSIS***

Oleh

NANDA KURNIASARI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER KEHUTANAN**

Pada

**Program Studi Magister Kehutanan
Fakultas Pertanian
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERANAN DEMOGRAFI DAN MODAL SOSIAL DALAM MENGUATKAN PERSEPSI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN MENGGUNAKAN *SECOND ORDER ANALYSIS*

Oleh:

NANDA KURNIASARI

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan kawasan konservasi yang secara administrasi berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Permasalahan dengan masyarakat terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berasal dari dalam kawasan menjadi salah satu perdebatan. Permasalahan tersebut mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan skema Perhutanan Sosial (PS) untuk pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Minimnya data tentang faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi peserta kemitraan kehutanan seperti demografi, modal sosial, dan persepsi. Disisi lain menurut para pakar, faktor-faktor tersebut penting dalam mendukung partisipasi terhadap suatu program. Tujuan penelitian membangun model variabel demografi dan modal sosial dalam menguatkan persepsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program kemitraan kehutanan. Penelitian dilakukan bulan Juli 2023 di TNBBS. Lokasi ini dipilih karena status TNBBS sebagai *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera*. Pengisian kuesioner oleh 95 responden anggota masyarakat yang sudah mendapatkan izin kemitraan kehutanan. Analisis data menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis *Structural Equation Modeling (SEM) (Second Order)* dengan *software Smart PLS.4.0*. Hasil penelitian menunjukkan demografi dan modal sosial berpengaruh langsung terhadap partisipasi pada program kemitraan kehutanan namun tidak dengan persepsi. Pendampingan dan membangun komunikasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat tentang kemitraan kehutanan merupakan faktor utama untuk kondisi saat ini.

Kata Kunci: Kemitraan, Perhutanan Sosial, Konservasi, TNBBS.

ABSTRACT

THE ROLE OF DEMOGRAPHICS AND SOCIAL CAPITAL IN STRENGTHENING PERCEPTIONS AND INCREASING PARTICIPATION IN FORESTRY PARTNERSHIP PROGRAMS USING SECOND ORDER ANALYSIS

By :

NANDA KURNIASARI

Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP) is a conservation area that is administratively located in Lampung Province and Bengkulu Province . Problems with the community regarding the use of non-timber forest products (NTFPs) that come from them from within the region is one of the debates. Problem the encourage the Ministry of Environment and Forestry to issue a Social Forestry (SF) scheme for the involvement of local communities in area management . There is a lack of data on factors that influence the participation of forestry partnership participants such as demography, social capital, and perception. On the side other according to para expert, factors the important in support participation to a program. The research objective is to build a model of demographic variables and social capital in strengthening perceptions and increasing community participation in forestry partnership programs . The research was carried out last month July 2023 at BBSNP. Location This chosen because of BBSNP's status as Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Filling questionnaire by 95 respondents are community members who have get permission partnership forestry. Analysis data use approach statistics descriptive And testing hypothesis Structural Equation Modeling (SEM) (Second Order) with Smart PLS .4.0 software. Results study show demographics and social capital influential direct to participation in the partnership program forestry however no with perception. Mentoring and building effective communication between officers and the community regarding forestry partnerships are the main factors for current conditions.

Keywords : Partnership, Social Forestry, Conservation, BBSNP.

Judul Tesis : PERANAN DEMOGRAFI DAN MODAL
SOSIAL DALAM MENGUATKAN
PERSEPSI DAN PENINGKATAN
PARTISIPASI PROGRAM KEMITRAAN
KEHUTANAN MENGGUNAKAN *SECOND
ORDER ANALYSIS*

Nama Mahasiswa : Nanda Kurniasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2224151001

Program Studi : Magister Kehutanan

Fakultas : Pertanian



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
NIP. 19641226 199303 2 001


Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP. 196105051987031 002

2. Ketua Program Studi


Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760123 200604 1 001

MENGESAHKAN

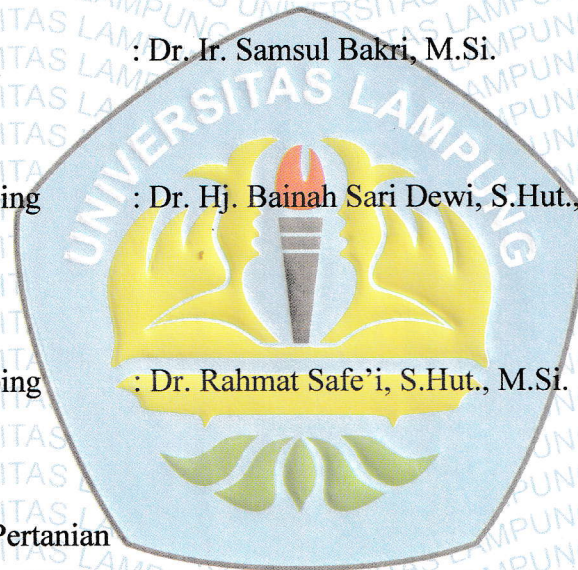
1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.

Sekretaris : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.

**Penguji
Bukan Pembimbing** : Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.

**Penguji
Bukan Pembimbing** : Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.

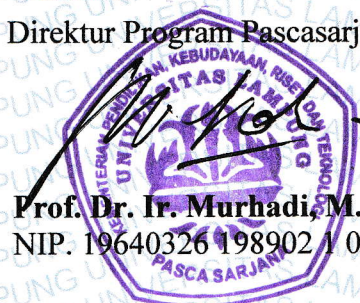


2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 19641118 198902 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“PERANAN DEMOGRAFI DAN MODAL SOSIAL DALAM MENGUATKAN PERSEPSI DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN MENGGUNAKAN *SECOND ORDER ANALYSIS* “** merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Semua hasil yang tertuang dalam tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis



Nanda Kurniasari
NPM: 2224151001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 1990, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari bapak Sofyan dan Ibu Sri Dayani. Tahun 2015 penulis menikah dengan Rudyanto dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alifa Zahra Al-Fatih dan Assyfa Naura Alfatih. Saat melakukan penelitian S2 Kehutanan, pada tahun 2022, penulis dikaruniakan anak ke tiga dan saat tesis ini disusun penulis masih mengandung dalam usia 33 minggu.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Mentari Kemiling Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1997, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Beringin Raya pada tahun 2002, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTPN 14 Bandar Lampung pada tahun 2005, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SLTAN 7 Bandar Lampung pada tahun 2008 dan Sarjana Kehutanan (S1) pada tahun 2013.

Tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kehutanan Universitas Lampung melalui jalur jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Selama menjadi mahasiswa penulis juga bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu – Lampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Seksi Konservasi Wilayah III Lampung bagian Pemanfaatan dan Pelayanan dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan. Sebelumnya, pada tahun 2014-2021 penulis bekerja di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang ditempatkan sebelum alih tugas yaitu pada Sub Bagian Program dan Kerjasama.

Kepada Mama, Papa, Suami dan anak-anak ku tersayang

Mama, Papa....

Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bentuk rasa syukur terhadap kasih sayang orangtua sampai saat ini. Walaupun sudah menikah, mama dan papa masih memperlakukan seperti anak kecil yang semua serba difasilitasi. Apalagi terkait perkuliahan, mama dan papa adalah support terbesar untuk melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya tertunda karena jarak lokasi kerja yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perkuliahan. Terimakasih diucapkan atas segalanya, atas rasa lelahnya menjaga cucu-cucunya yang masih aktif saat ditinggal untuk bekerja dan kuliah. Hal berat memang menitipkan anak, memberikan beban tambahan pada mama dan papa untuk kembali mengurus anak-anak yang seharusnya sudah beristirahat. Terimakasih tak terhingga semoga mama dan papa selalu sehat dan bahagia tanpa kurang satu apapun.

Suami ku ..

Terima Kasih atas rasa percaya yang telah sayang berikan untuk mengizinkan bunda melanjutkan pendidikan kembali setelah tertahan beberapa waktu. Terimakasih atas support yang kamu berikan walaupun jarak Lampung – Mukomuko Bengkulu itu tidak dekat, sayang selalu menjadi yang paling meyakinkan ketika bunda mulai jenuh atas rutinitas bekerja sambil kuliah. Terimakasih sayang, semoga kita selalu bersama sampai tua dan sampai maut memisahkan.

Anak-anakku ..

Anak-anakku, bunda minta maaf karena belum bisa menjadi orangtua yang teladan sampai saat ini. Bunda minta maaf atas waktu yang kurang untuk kita bermain bersama karena kesibukan bunda. Bunda juga minta maaf untuk ilmu yang belum sempat bunda berikan kepada anak-anak bunda semua karena keterbatasan. Terimakasih karena sudah menjadi anak-anak yang baik dan penghilang rasa lelah bunda setelah bekerja. Terimakasih atas pengertiannya selama ini. Terimakasih untuk semua hal karena bunda banyak belajar tentang kesabaran dari anak-anaku yang tidak terasa semakin besar. Semoga Allah selalu bersama ditiap langkah mu nak, jadilah anak yg sehat kuat dan pemberani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Peranan Demografi dan Modal Sosial Dalam Memperkuat Persepsi dan Peningkatan Partisipasi Program Kemitraan Kehutanan Menggunakan *Second Order Analysis*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister kehutanan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P selaku Ketua Jurusan Kehutanan sekaligus penguji utama pada ujian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal hingga hasil dalam penyusunan tesis terdahulu.
3. Bapak Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Kehutanan dan penguji kedua saya atas bimbingan dan arahan akademik selama perkuliahan.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P. selaku pembimbing utama dan pembimbing akademikas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. selaku pembimbing akademik atas bimbingan dan dukungannya selama proses pendidikan saya di Program Studi Magister Kehutanan Universitas Lampung.
7. Bapak Kepala Balai KSDA Bengkulu – Lampung selaku Pembina di Unit Kerja saya terimakasih atas dukungan dan arahnya.

8. Bapak Kepala SKW III Lampung selaku atasan langsung saya, terimakasih atas dukungan dan arahnya.
9. Kepala Balai Besar TNBBS terima kasih atas arahan dan diberikan izin untuk melakukan penelitian di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
10. Pegawai Lingkup SKW III Lampung atas dukungan dalam menyelesaikan pendidikan magister kehutanan khususnya pada sub bagian pelayanan dan pemanfaatan.
11. Pegawai Lingkup Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan khususnya yang membantu dalam penelitian yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat - sahabat angkatan 2022 Magister Kehutanan Universitas Lampung atas dukungan dan motivasinya.

Bandar Lampung

Nanda Kurniasari

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	5
1.3. Kerangka Pemikiran	5
1.4. Hipotesis	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	7
2.2. Perhutanan Sosial.....	10
2.3. Kemitraan Kehutanan	12
2.4. Kemitraan Kehutanan Bagi Kawasan Hutan	15
2.5. Masyarakat Sekitar Kawasan.....	18
2.6. Demografi Masyarakat	20
2.7. Modal Sosial Masyarakat	22
2.8. Persepsi	25
2.9. Partisipasi.....	27
3.0. <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	29
3.1. <i>Partial Least Square</i> (PLS)	30
3.2. <i>Second Order PLS SEM</i>	33
3.2. <i>Software Smart PLS</i>	34
III. METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Waktu dan Tempat.....	37

3.2. Alat dan bahan	38
3.3. Metode	38
3.4. Kerangka Penelitian.....	51
IV.HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
4.3. Analisis dan Diskusi	71
V. SIMPULAN DAN SARAN	105
5.1. Simpulan.....	105
5.2. Saran	105
5.3. Rekomendasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	122
Tabel 36	122
Gambar 16-27.....	125
Kuesioner Penelitian.....	131

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Alat dan bahan yang digunakan dalam Penelitian	26
2. Sampel responden pada BPTN Wilayah I Semaka	27
3. Sampel responden pada BPTN Wilayah II Liwa	28
4. Instrumen pengukuran indikator demografi.....	32
5. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (kepercayaan)	32
6. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (norma/nilai).....	32
7. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (jaringan)	33
8. Instrumen pengukuran indikator persepsi masyarakat.....	33
9. Instrumen pengukuran indikator partisipasi.....	33
10. Penataan zona pengelolaan TNBBS.....	43
11. Sebaran SDM berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin.....	46
12. Sebaran pejabat fungsional berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.....	46
13. Pembagian wilayah pengelolaan Balai Besar TNBBS.....	48
14. Kerjasama penguatan fungsi bersama masyarakat.....	51
15. Responden berdasarkan usia	59
16. Responden berdasarkan pekerjaan	60
17. Responden berdasarkan suku	60
18. Responden berdasarkan pendapatan	61
19. Responden berdasarkan jarak lahan garapan dengan tempat tinggal.....	61
20. Hasil tanggapan responden pada variabel laten	62
21. <i>Outer loading/loading factor</i>	66
22. <i>Composite reliability</i> dan <i>Average Variance Extracted</i>	67

23. <i>Discriminant validity-Fornell Lacker</i>	68
24. <i>Outer loading/loading factor</i>	69
25. <i>Composite reliability dan Average Variance Extracted</i>	71
26. <i>Fornell Lacker</i>	72
27. <i>Inner VIF</i>	72
28. Pengujian model struktural/pengujian hipotesis.	74
29. Interval konfiden 95% <i>path coefficient</i>	75
30. Pengujian mediasi	83
31. Pengujian mediasi <i>convident interval</i>	83
32. <i>f square</i>	84
33. <i>Statistic Upsilon (v)</i>	84
34. <i>R square</i>	85
35. <i>Model Fit</i>	86
36. Tabel hasil olah data kuesioner	109

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Kerangka teoritis.....	6
2. Peta lokasi penelitian	25
3. Model algoritma <i>second order</i> PLS – SEM yang diusulkan.....	34
4. Kerangka penelitian.	39
5. Peta tipe ekosistem penyusun TNBBS.....	42
6. Peta penataan zona pada TNBBS.....	43
7. Stuktur organisasi Balai Besar TNBBS	45
8. Trend penurunan jumlah pegawai Balai Besar TNBBS 2019 – 2022	45
9. SDM Balai Besar TNBBS berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	46
10. Peta sebaran responden.	62
11. Model <i>algoritma</i> evaluasi model pengukuran yang diusulkan	64
12. Pengukuran tingkat indikator model <i>algoritma</i> pada pengukuran variabel <i>first order</i>	65
13. Hasil pengukuran tingkat indikator model <i>algoritma</i> pada pengukuran variable modal sosial setelah emiliasi indikator	66
14. Model aloritma hasil evaluasi model pengukuran.	69
15. Hasil uji <i>bootstrapping</i>	73
16. Melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait penelitian dengan pengelola Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.	112
17. Lokasi Koordinat Kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.....	112
18. Petugas sedang memberikan panduan dalam pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan.....	113

19. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan pada BPTN Wilayah I Semaka.	113
20. Pertemuan dengan anggota kelompok kemitraan di Kantor Resort Biha.	114
21. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan pada BPTN Wilayah I Semaka di rumah masyarakat.	114
22. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan pada BPTN Wilayah II Liwa di rumah masyarakat.	115
23. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan dibantu oleh petugas dari TNBBS.	115
24. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan dibantu oleh petugas dari TNBBS di Kec. Balik Bukit.	116
25. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan dibantu oleh petugas dari TNBBS di Kec. Balik Bukit.	116
26. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan dibantu oleh petugas dari TNBBS di gubuk pada lahan garapan.	117
27. Pengisian kuesioner oleh anggota kelompok kemitraan kehutanan dibantu oleh petugas dari TNBBS di gubuk pada lahan garapan.	117

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Besar TNBBS adalah Unit Pelaksana Teknis KLHK yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tepatnya pada tahun 2011 Situs warisan alam dunia TNBBS dengan luas ± 355.511 ha yang dikelilingi 238 desa dengan 68 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS masuk dalam *List In Danger* karena dianggap kurang optimal dalam menangani isu-isu yang ada. Permasalahan dengan masyarakat terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari dalam kawasan taman nasional menjadi salah satu perdebatan yang sering kali dihadapi tidak terkecuali di TNBBS. Khususnya terhadap masyarakat yang sudah memanfaatkan HHBK dari dalam kawasan TNBBS sebelum maupun setelah kawasan tersebut ditetapkan statusnya menjadi kawasan konservasi. Menurut Hakim dkk., (2018) dan Sen dkk., (2020), akses masyarakat yang menjadi terbatas dan kebutuhan yang meningkat menjadikan kawasan hutan sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan sosial dalam pengelolaan suatu kawasan.

Permasalahan antara mendahulukan kepentingan masyarakat atau kepentingan konservasi keanekaragaman hayati di taman nasional mendorong KLHK menerbitkan skema PS dengan tujuan untuk pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan sebagai upaya memperbaiki fungsi kawasan yang diatur dalam PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016. Ruang lingkup perhutanan sosial berdasarkan peraturan tersebut meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan

(HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Berdasarkan peraturan tersebut juga dijelaskan tentang areal kemitraan kehutanan untuk kawasan konservasi yang secara jelasnya diatur pada pasal 43.

Selanjutnya sebagai turunan dari PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 dan PermenLHK Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi sebagai panduan pelaksanaan kemitraan kehutanan di kawasan konservasi. Kemitraan kehutanan diharapkan menjadi sebuah upaya penyelesaian permasalahan terhadap aktivitas yang sudah dilakukan pada kawasan konservasi dengan kolaborasi melalui perjanjian kerjasama antara kepala unit pengelola dengan masyarakat setempat yang tinggal didalam/sekitar kawasan konservasi yang tata cara kerjasama perjanjian diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017.

Sejalan dengan Prayitno (2020) yang menyatakan bahwa kemitraan kehutanan merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan konservasi terhadap kebutuhan untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi. Dalam skema ini masyarakat diposisikan sebagai subjek dalam berbagai model pengelolaan kawasan. Sebagaimana menurut Wiratno (2018) dan Raharjo dkk., (2019) memposisikan masyarakat sebagai subjek secara tidak langsung cara ini juga dapat mendorong pelaksanaan demokrasi di tingkat tapak pengelolaan kawasan.

Pada Perkembangannya, untuk melaksanakan ketentuan pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, ditetapkan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang didalamnya mengatur kembali tentang program Kemitraan Konservasi sebagai payung hukum untuk kerjasama antara kepala unit pengelola pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Kemitraan kehutanan diharapkan dapat mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan nantinya banyak yang secara sukarela meninggalkan areal rambahannya dan seterusnya agar berdaya dan memiliki kemampuan serta keahlian untuk bekerja di sektor-sektor lain di luar kawasan hutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Raharjo dkk. (2019) dan Hartoyo (2020), bahwa konsep dalam kemitraan ini adalah konsep saling percaya, saling menguntungkan dan saling gotong royong. Dengan begitu implementasi Pasal 33 (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dapat berjalan sesuai mandatnya namun tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) kemitraan kehutanan di TNBBS sampai saat ini terdapat 9 (sembilan) PKS yang terbagi atas 2 (dua) PKS di BPTN Wilayah I Semaka dan 7 (tujuh) PKS di Bidang Pengelolaan Wilayah II Liwa. Kebijakan kemitraan kehutanan yang sudah diimplementasikan di TNBBS sejak tahun 2018 yang dicangkan sebagai strategi penyelesaian permasalahan itu belum menunjukkan hasil yang begitu menggembirakan dari pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Okthalamo dkk., (2022) bahwa efektivitas program kemitraan kehutanan di TNBBS belum berjalan efektif dan optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah yang mempengaruhi hal tersebut sehingga kemitraan konservasi tidak berjalan secara efektif yang dilihat dari perspektif masyarakat sebagai pemegang izin kemitraan.

Mengetahui efektivitas kemitraan kehutanan dari perspektif masyarakat sebagai pemegang izin adalah hal yang harus dilakukan. Sebagaimana pernyataan Pangestika (2018) ; Suhardjito dan Wulandari (2019) ; Firnanda dkk., (2020),

bahwa persepsi mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Demografi dan modal sosial masyarakat perlu diketahui apakah memiliki pengaruh terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat pada kemitraan kehutanan. Menurut Wulandari *et al.*, (2021a), persepsi seseorang merupakan variabel yang banyak dipengaruhi oleh karakteristik individu. Sebagaimana hasil penelitian dari Suyono dkk., (2017) bahwa, peran aktif masyarakat akan tumbuh jika semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat karena adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kawasan. Apabila masyarakat memiliki persepsi positif tentang keberadaan hutan, maka masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap keberadaan hutan tersebut, begitu juga sebaliknya (Aspuan & Nugraha, 2022).

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor (Zande *and* Mzuza, 2022). Peneliti menduga bahwa faktor tersebut terdiri dari demografi, persepsi dan modal sosial. Demografi dalam penelitian ini mencakup ciri-ciri khusus perseorangan atau kelompok yang dimiliki. Sebagaimana menurut Siwi (2009) dan Safitri (2023), yang disebut dengan karakteristik demografi meliputi: umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, dan status tempat tinggal. Status tempat tinggal menurut Safitri (2023) yaitu jarak tempat tinggal dengan lokasi tujuan, karena terkait akses dan transportasi yang digunakan. Jarak adalah salah satu hal yang penting karena terkait waktu yang harus ditempuh masyarakat dari tempat tinggal (Rusmarani, 2017). Persepsi erat kaitannya dengan komunikasi. Persepsi merupakan inti dari komunikasi sehingga jika persepsi tidak akurat maka tidak akan tercipta komunikasi yang efektif. Sebagaimana menurut Raharjo dkk., (2019), faktor utama dari keberhasilan kemitraan kehutanan adalah komunikasi. Modal sosial dalam penelitian ini mencakup kepercayaan, norma/nilai dan jaringan. Sebagaimana menurut Wulandari *et al.*, (2021a), modal sosial yang ada dalam masyarakat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan, norma dan jaringan, merupakan gambaran ikatan yang akan memfasilitasi kesepakatan bersama untuk melestarikan suatu program.

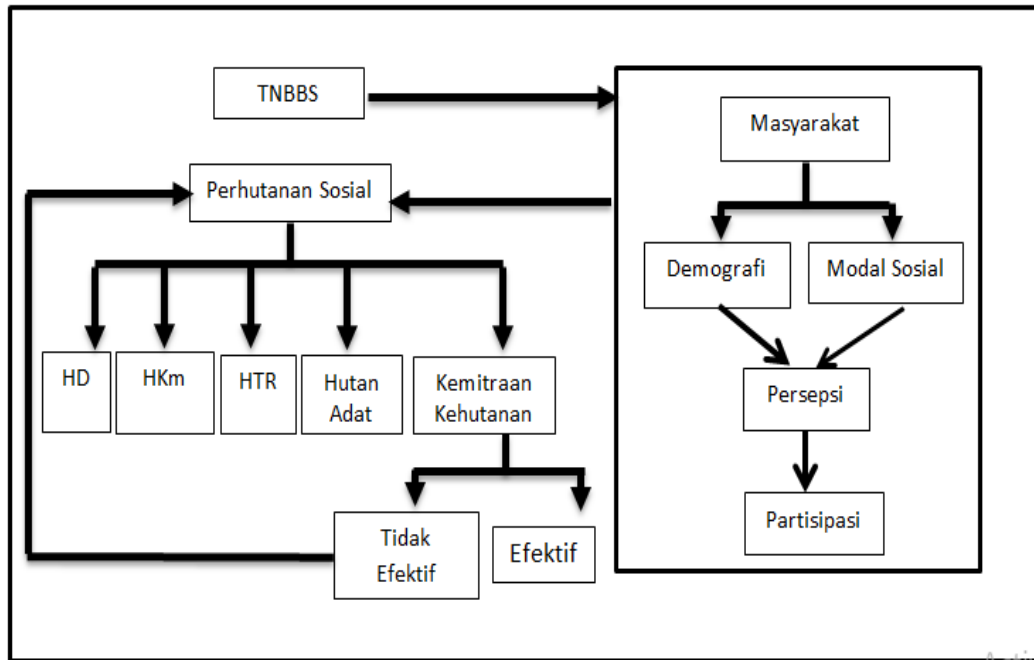
Saat ini masih minim data pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat kemitraan kehutanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dunggio dan Gunawan (2009) ; Raharjo dkk., (2019) bahwa kemitraan kehutanan belum menjadi isu utama dalam penelitian dan pendidikan. Jumlah peminat mengikuti program kemitraan kehutanan cukup banyak namun tidak diimbangi dengan pelaksanaan efektif sehingga perlu dilakukan penelitian sebagai dasar dalam penyusunan konsep strategi yang dituangkan dalam permodelan. Konsep permodelan diperlukan untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan kemitraan kehutanan sebagai kepastian hukum dalam pelaksanaan kemitraan pada kawasan konservasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah khususnya pengelola TNBBS terkait model program/kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan izin kemitraan kehutanan di TNBBS. Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi petugas di lapangan dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan sosialisasi berdasarkan faktor demografi dan modal sosial masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka penguatan persepsi dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap tercapainya tujuan dari program kemitraan kehutanan yaitu kelestarian kawasan dan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat sekitar kawasan TNBBS.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah membangun model variabel demografi dan modal sosial dalam menguatkan persepsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat peserta program kemitraan kehutanan.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian dalam bentuk bagan untuk mengetahui bagian mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Bentuk kerangka pemikiran disajikan pada Gambar 1. berikut :



Gambar 1. Kerangka teoritis.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah :

H₁ : Variabel demografi secara langsung mempengaruhi partisipasi;

H₂ : Variabel demografi secara langsung mempengaruhi persepsi;

H₃ : Variabel modal sosial secara langsung mempengaruhi partisipasi;

H₄ : Variabel modal sosial secara langsung mempengaruhi persepsi;

H₅ : Variabel persepsi secara langsung mempengaruhi partisipasi;

H₆ : Variabel persepsi menjadi variabel yang mediasi hubungan antara demografi dan modal sosial terhadap partisipasi

H₇ : Model keseluruhan dapat baik dan sesuai dalam menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel demografi, modal sosial, persepsi dan partisipasi kemitraan kehutanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem alami yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU No.5/1990). Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) secara administrasi berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu dengan luas \pm 355.511 ha dikelilingi 238 desa dengan 68 desa diantaranya berbatasan langsung dengan TNBBS (Statistik Balai Besar TNBBS, 2022). Tahun 1935, kawasan TNBBS ditetapkan melalui Besluit Van der Gouvernour-Generat Van Nederlandseh Indie No 48 stbl. 1935, dengan nama SSI (Sumatra Selatan I) seluas 356.800 ha yang mencakup wilayah Reg. 49B Krui Barat, Reg. 46B Sekincau, Reg. 47B Bukit Penetoh, Reg. 22B Kubunicik, Reg. 49 SSI bagian Selatan dan Reg. 52 Kaur Timur.

Pada tanggal 1 April 1978 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 Juli 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam bahwa pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Sumatra Selatan I dikelola oleh Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I yang berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Tanjung Karang. Kemudian pada tahun 1982 bersamaan dengan Kongres Taman Nasional Dunia Kedua di Bali pemerintah mendeklarasikan 11 taman nasional. Pada tanggal 14 Oktober 1982 Kawasan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I dinyatakan sebagai kawasan TNBBS melalui Surat Pernyataan (SP) Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional bahwa organisasi Sub Balai Kawasan Pelestarian Sumatera Selatan I ditingkatkan statusnya menjadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan setingkat Eselon III dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Selanjutnya berdasarkan Berdasarkan SK Dirjen PHKA No. 46/Kpts/IV-Sek/84 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional bahwa wilayah kerja TNBBS adalah Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I.

Tahun 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 1990 tanggal 5 Februari 1990 ditetapkan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (CAL-BBS) dengan luas ± 21.600 ha yang pengelolaannya terintegrasi dengan TNBBS. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: 489/Kpts-II/1999 tanggal 29 Juni 1999 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 luas kawasan TNBBS adalah 313.572,48 ha. Luas Kawasan TNBBS mengalami perubahan yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 489/KptsII/1999 tanggal 29 Juni 1999 telah ditetapkan Kelompok Hutan Kaur Timur (Register 52) yang terletak di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dari semula 66.000 ha menjadi 64.711 ha. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/Kpts- II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung dan hasil digitasi Balai Besar TNBBS maka luas CAL-BBS menjadi seluas ± 17.280 ha.

Pada bulan Juli 2004 bersama dengan TN Gunung Leuseur dan TN Kerinci Seblat, UNESCO menetapkan TNBBS sebagai Tapak Warisan Dunia (*World Heritage Site*) dengan nama "*Tropical Rainforest Heritage of Sumatra*" (TRHS). Kemudian pada perkembangannya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Permen LHK Nomor : P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016).

TNBBS memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dan keterwakilan tipe struktur vegetasi dengan ekosistem yang lengkap dan tidak terputus yaitu (Balai Besar TNBBS, 2020): Marine meliputi :

- Mangrove terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga.
- Padang lamun terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga. • Terumbu karang terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga.
- Danau (Danau Minyak, Danau Asam, Danau Lebar, Danau Belibis, Danau Menjuket) • Muara sungai yang terdapat di Way Semaka, Way Pemerihan, Way Canguk, dll.

Terrestrial meliputi :

- Hutan pantai (0 – 2 mdpl) seluas 3.568 Ha.
- Hutan hujan dataran rendah (0 – 500 mdpl) seluas 160.560 Ha.
- Hutan hujan bukit (500 – 1.000 mdpl) seluas 121.312 Ha.
- Hutan hujan pegunungan bawah (1.000 – 1.500 mdpl) seluas 60.655 Ha • Hutan hujan pegunungan tinggi (> 1.500 mdpl) seluas 10.704 Ha.
- Sungai (terdapat 181 sungai yang berhulu di kawasan TNBBS).

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mempunyai potensi pohon damar mata kucing (*Shorea javanica*) yang tumbuh di kawasan tradisional seluas sekitar 446 hektar di sepanjang aliran Sungai Liwa Krui, Potensi hasil damar diperkirakan mencapai 59 kg/ha (Yuizar dkk., 2014).

2.2. Perhutanan Sosial

Upaya pengelolaan hutan konservasi yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, LSM, ataupun pihak terkait selama ini kurang berhasil sesuai dengan yang diharapkan di karenakan kurangnya melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan tersebut (Purwatiningsih, 2022). Kebijakan resolusi konflik tenurial kawasan hutan melalui program reforma agraria menawarkan komitmen pengalokasian anah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha di dalam kawasan hutan yang akan dibuka aksesnya bagi masyarakat melalui berbagai skema pemberian izin maupun konsesi (Diantoro, 2020).

Hak masyarakat Indonesia untuk bebas mengakses hutan mulai diwujudkan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/KptsII/1999 tentang HKm. Penerapan kebijakan ini merupakan upaya untuk mengurangi perambahan masyarakat terhadap hutan dan permasalahan hak guna lahan yang ada pada masa renovasi. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia terus memperluas program perhutanan sosial dengan dengan program Hutan Tanaman Rakyat (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007) dan Hutan Desa (Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 49/MenhutII/2008). Selanjutnya skema perhutanan sosial tersebut diatur dalam P. 83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial yang didalamnya mencakup juga tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan adat, dan Kemitraan Kehutanan (Wulandari dkk., 2016).

Menurut Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 83 Tahun 2016 yang dimaksud dengan perhutanan sosial adalah pemanfaatan masyarakat hukum adat atau masyarakat sekitar yang masih tersisa dalam kawasan hutan nasional atau hutan adat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial dapat berbentuk lima kegiatan: hutan rakyat, hutan desa, hutan rakyat, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemitraan. Perhutanan sosial

mewakili paradigma baru bagi masyarakat, artinya masyarakat bisa menjadi pengelola hutan, bukan sekedar pengusaha besar (Martapani dkk., 2021).

Masyarakat di sekitar taman nasional merupakan masyarakat tradisional yang memiliki pola kehidupan dan kearifan dalam mengelola kawasan hutan di sekelilingnya selama puluhan tahun (Purwatiningsih, 2022). Perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal dengan memperkuat kapasitas mereka, memberikan akses, dan berpartisipasi dalam mencapai pengelolaan hutan lestari. Mereka secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang kuat, mandiri, bertanggung jawab dan profesional (Adnan dkk., 2015).

Perhutanan sosial merupakan suatu sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan dan dapat dilakukan dimana saja pada lahan milik pribadi. Perhutanan sosial juga berasumsi bahwa masyarakat merupakan aktor yang paling berkepentingan dengan berhasil tidaknya pengelolaan hutan di sekitar hutannya (Landawati, 2021). . Pembinaan dan pengelolaan hutan dengan berbagai pendekatan baik secara budaya, pembangunan fisik maupun secara ekologis, dimana pembinaan dan pengelolaan merupakan faktor penting dalam usaha pelibatan masyarakat pada konservasi perlu dilakukan (Purwatiningsih, 2022).

Program perhutanan sosial memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial dalam menjamin legalitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa meningkatnya pengetahuan untuk mengelola hutan, menyelesaikan konflik lahan, perubahan perilaku pembukaan lahan tanpa bakar dan penguatan kembali budaya gotong royong yang secara ekonomi meningkatkan produksi, pendapatan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja (Martapani dkk., 2021). Menurut Ojwang (2020) bahwa pengelolaan konservasi bersama antara masyarakat dan pemerintah di wilayah Makuleke I Taman Nasional Krugeler

menjadi contoh terbaru dalam pengelolaan sumberdaya yang melibatkan bersama-sama.

2.3 Kemitraan Kehutanan

Kemitraan dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antar stakeholder yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. (Hartoyo dkk. 2020).

Kemitraan kehutanan merupakan program kerjasama antara pengelola hutan dan masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk tujuan ekonomi (Ma'ruf, 2019). Kebijakan Kemitraan Konservasi telah menyebabkan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan kawasan konservasi, perubahan cara kerja pengelola kawasan konservasi, dan perubahan interaksi petugas dengan masyarakat (Raharjo dkk., 2019). Skema ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan (Utami dan Ratnaningsih, 2018).

Kemitraan konservasi merupakan terobosan yang sangat baik dalam menyelesaikan persoalan tenurial di Indonesia. Namun terdapat hal-hal yang harus dibenahi dalam mengimplementasikan konsep kemitraan konservasi salah satu dengan menguatkan peran lembaga karena memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan konsep kemitraan konservasi (Hartoyo dkk., 2020). Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan pengelola taman nasional dalam rangka penyelamatan dan pelestarian hutan salah satunya adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan yang ternyata upaya tersebut belum memperlihatkan dampak yang cukup memuaskan, karena masih banyak masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan hutan tetapi tidak melestarikannya kembali sehingga banyak kawasan hutan yang mengalami kerusakan (Purwatiningsih, 2022).

Pada esensinya indikator yang digunakan bagi terbentuknya perilaku positif tersebut dimuat dalam petunjuk teknis yang telah disediakan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem nomor 6 tahun 2018 jo Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem nomor 2 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 dan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi sebagai panduan pelaksanaan kemitraan kehutanan di kawasan konservasi. Kemitraan konservasi di TNBBS saat ini berada di zona tradisional. Daerah yang ditetapkan sebagai zona tradisional dahulu bekas areal perambahan oleh masyarakat Krui yang telah ditinggalkan akibat pengusiran/penurunan (Balai Besar TNBBS, 2020).

Selama ini penelitian tentang kemitraan yang dilakukan di TNBBS dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat (Ristianasari dkk., 2013; Winarno dkk., 2019), ekowisata (Agustina dkk., 2018; Rahayu dan Dewi, 2022). Sudah dilakukan penelitian terkait implementasi program kemitraan konservasi di TNBBS dengan fokus pada Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Liwa (Okthalamo dkk., 2022), namun belum ada yang meneliti tentang keberlanjutan kemitraan konservasi yang dikorelasikan dengan demografi dan modal social terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat sebagai pemegang izin kemitraan konservasi.

Kemitraan Kehutanan di dalam Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut Kemitraan Konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat

berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan (Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018). Kemitraan konservasi (Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018) memosisikan masyarakat sebagai mitra setara tidak ada yang mencoba mengatur hal ini karena peraturan sebelumnya dianggap membahayakan keutuhan cagar alam (Raharjo dkk., 2019).

Sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan konservasi, yaitu menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lokal di dalam dan sekitar cagar alam, pemerintah telah menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk menjamin akses pemanfaatan cagar alam oleh masyarakat lokal. Hal ini juga mencakup pengaturan penyelenggara. Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.S. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 (Prayitno, 2020). Direkomendasikan agar program kemitraan restorasi ekosistem dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada dan dikembangkan melalui sinergi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Rochaedi et al., 2020).

Program kemitraan merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan hutan nasional oleh masyarakat (Saipurrozi dkk., 2018). Adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam sebagaimana terjadi di tengah masyarakat merupakan hal yang penting untuk segera diselesaikan (Diantoro, 2020).. Agar pemanfaatan dan pelestarian hutan konservasi dapat berhasil, strategi yang harus dikembangkan adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management) yaitu keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dalam hal ini masyarakat ikut memikirkan, memformulasi, merencanakan, mengimplementasi, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan (Purwatiningsih, 2022).

Faktor pendukung kemitraan hutan antara lain tingginya dukungan masyarakat terhadap program kemitraan hutan, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan, dan tingginya dukungan pemangku kepentingan lainnya namun, faktor penghambatnya antara lain rendahnya kualitas usahatani, permasalahan yang biasa terjadi dalam pengelolaan kelompok, dan kurangnya komunikasi di kalangan petani sehingga menyebabkan terdapatnya permasalahan antara pemerintah dan organisasi petani, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Wandira dkk., 2020). Menurut Utami dan Ratnaningsih (2018), bahwa faktor pendukung kemitraan kehutanan berasal dari masyarakat, sehingga motivasi dari segi ekonomi maupun ekologi perlu dikembangkan agar tetap mempertahankan keberadaan kawasan hutan.

Kebijakan perhutanan sosial yang disosialisasikan dengan baik, membuat masyarakat mengetahui mengenai status hutan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. yang tentunya akan membantu kesadaran masyarakat di dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan (Martapani dkk., 2021).

Kemitraan konservasi merubah cara kerja petugas Taman Nasional yang dahulu petugas ditakuti karena hanya menyampaikan sejumlah larangan kepada masyarakat dalam berkegiatan di dalam kawasan konservasi, disertai penindakan apabila larangan tersebut tidak dipatuhi namun sekarang petugas berupaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengubah pandangan negatif terhadap petugas dan meraih kepercayaan masyarakat (Raharjo dkk., 2019).

2.4. Kemitraan Kehutanan Bagi Kawasan Hutan

Program kemitraan kehutanan secara tidak langsung memberikan ruang antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelestarian kawasan hutan yang dikelola dengan mengacu pada empat pilar yaitu tata pengelolaan lahan, tata kelola usaha, tata kelola niaga dan tata kelola kelembagaan (Adnan dkk., 2015). Adanya PKS menjadikan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan

menjadi lebih baik. Kawasan yang merupakan areal kerja yang ada dalam PKS akan dijaga dengan baik oleh kelompok masyarakat dengan harapan bahwa areal tersebut merupakan salah satu sumber penghidupannya. (Raharjo dkk., 2019). Kemitraan kehutanan atau kemitraan konservasi mendorong peningkatan eksistensi masyarakat sebagai mitra pengelola kawasan sehingga selain ikut menjaga kawasan, hal ini tentunya membawa kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan zona pemanfaatan yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan (Hartoyo dkk., 2020).

Program kemitraan konservasi mengharuskan pengelola untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi untuk mengetahui potensi sumber daya alam, jenis dan bentuk pemanfaatan serta sejarah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan (Okthalamo dkk, 2022). Manfaat yang diperoleh dengan adanya program kemitraan konservasi yaitu membatasi perluasan lahan garapan masyarakat dalam kawasan (Raharjo dkk., 2019). Kemitraan konservasi sebagai alternative penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan (Wandira dkk., 2020).

Dampak kemitraan konservasi dalam zona pemanfaatan tradisional terhadap pelestarian ekosistem hutan adalah terjalinnya kerjasama dalam upaya meningkatkan potensi yang ada dan menjaga keberlangsungan kawasan hutan (Jabalnur dkk., 2023). Kemitraan mampu membangun kesadaran kelompok untuk menjaga kelestarian hutan karena dengan kemitraan, kelompok menyadari jika kondisi hutan baik, maka hasil panen HHBK akan meningkat sehingga meningkatkan penghasilan (Ramawati dkk., 2022). Keberhasilan program kemitraan konservasi mampu meningkatkan pendapatan bagi anggotanya sedangkan dari aspek lingkungan terdapat perbedaan pada lokasi kemitraan konservasi dengan tutupan (35,78%) dan diluar lokasi kemitraan konservasi tutupan (20,84%) (Loli dkk., 2021).

Berlakunya Perdirjen KSDAE Nomor 6/2018 bertolak belakang dengan tujuan ditetapkannya kawasan konservasi karena memberikan legal akses bagi masyarakat terhadap kawasan hutan meskipun untuk kebutuhan sehari-hari, sebab hutan konservasi pada hakikatnya bukan untuk dikelola oleh masyarakat karena hak pengelolaan kepada masyarakat akan berakibat kepada pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan konservasi yang berakibat pembukaan hutan secara massif dengan skala kecil, sehingga hutan konservasi tidak dapat disebut sebagai kawasan konservasi (Sadikin, 2021). Kemitraan konservasi memberikan dampak yang baik meskipun belum maksimal karena dapat membantu mengelola kelestarian kawasan hutan dan menambah pendapatan sampingan bagi masyarakat anggota program kemitraan konservasi (Situmorang dkk., 2022).

Tutupan lahan serta kondisi ekosistem pada lokasi kemitraan konservasi tidak mengalami banyak perubahan karena dipengaruhi oleh pelaksanaan program kemitraan konservasi dilaksanakan pada zona tradisional dan zona rehabilitasi (Okthalamo dkk., 2022). Penerapan kemitraan konservasi secara ekologi masih ada pelanggaran yang dilakukan anggota kemitraan misalnya tanaman pokok tidak mencapai jumlah yang telah ditanam namun, program kemitraan konservasi mampu memberikan manfaat secara ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup anggota kemitraan (Prasetya dkk., 2023).

Kegiatan kemitraan konservasi pada zona rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat dan para pihak merupakan bagian dari perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar kawasan (Edotita dan Zulwisman, 2021). Kemitraan konservasi menjadi salah satu resolusi konflik klaim lahan berupa kebun dan pemukiman dalam taman nasional (Aneng dkk., 2021) Program kemitraan kehutanan dapat dikatakan berhasil pada tahap penyelesaian sengketa pertanahan artinya, masyarakat diakui dan diberikan akses hukum terhadap pengelolaan lahan garapan di wilayahnya, sehingga memberikan kedamaian, kenyamanan dan rasa aman (Rochaedi dkk., 2021).

Salah satu ukuran keberhasilan kemitraan konservasi adalah jumlah kelompok dan luas areal yang ekosistemnya dipulihkan (Raharjo dkk., 2019). Melalui Program Kemitraan Kehutanan, intensitas sengketa kepemilikan lahan berkurang hingga 80% hal tersebut disebabkan karena kemitraan kehutanan memberikan hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan dan merupakan elemen penting dalam mengurangi intensitas sengketa kepemilikan (Rukminda dkk., 2020).

Keberhasilan dari program kemitraan konservasi yaitu mengurangi aktifitas ilegal dan kebakaran taman nasional sekaligus membantu perekonomian anggota kemitraan (Safitri dkk., 2023).

Ada enam faktor pendukung implementasi Kemitraan Konservasi yang bisa dipetik dari pembelajaran menurut Raharjo dkk. (2019) yaitu .

- a) kepemimpinan,
- (b) komunikasi,
- (c) perubahan cara kerja dari Balai Taman Nasional,
- (d) menemukan dan bekerja bersama local champion,
- (e) dukungan publik dan stakeholder,
- (f) meningkatnya kesadaran masyarakat lokal terhadap konservasi

Selanjutnya ada empat faktor penghambat implementasi Kemitraan Konservasi yang bisa diperoleh dari pembelajaran di yang dikaji melalui studi literatur. menurut Raharjo dkk. (2019) yaitu :

- (a) kurang dukungan bagi lembaga kolaborasi multi-pihak;
- (b) perbedaan kepentingan;
- (c) manfaat kemitraan konservasi belum bisa dirasakan; dan
- (d) dinamika masyarakat lokal.

2.5. Masyarakat Sekitar Kawasan

Sesuai dengan Pasal 1 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2004 “*Masyarakat Setempat adalah kesatuan komunitas sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar*

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang mata pencahariannya yang bergantung pada sumber daya alam di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, baik langsung maupun tidak langsung, hubungan kesejarahan, keterikatan budaya dan tempat tinggal, serta masih terdapatnya pranata sosial dalam pengaturan tata tertib kehidupan bersama”.

Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara adil dan optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Permenhut Nomor : P.39/Menhut-II/2013). Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan/atau di dalam KSA/KPA atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumberdaya alam di KSA/KPA (Pasal 1 ayat 11 Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018). Masyarakat sekitar kawasan pada umumnya mempunyai keterbatasan sehingga memerlukan dorongan dari pengelola kawasan membangkitkan peran serta masyarakat (Purwatiningsih, 2022).

Masyarakat setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya alam di zona tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pasal 1 ayat 12 Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018). Kelompok sasaran yang dimaksud dalam Perdirjen KSDAE No. 6 Tahun 2018 adalah spesifik, hanya mengacu pada masyarakat setempat (Raharjo dkk., 2019). Sebagaimana menurut Wiratno (2018) dan Raharjo dkk., (2019), memposisikan masyarakat sebagai subjek secara tidak langsung cara ini juga dapat mendorong pelaksanaan demokrasi di tingkat tapak pengelolaan kawasan. Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan hutan maka diharapkan akan kembali muncul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hutan dari semua pihak (Purwatiningsih, 2022).

Sebagian besar sumber ekonomi alternatif desa penyangga TNBBS bersumber dari kegiatan wisata dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu dari getah damar mata kucing (Balai Besar TNBBS, 2020). Penduduk lokal sekitar TNBBS terutama di daerah pesisir yang tidak dapat terlepas dari hasil hutan bukan kayu berupa mencari atau memungut getah damar mata kucing sebagai sumber penghasilan atau penambah penghasilan keluarga. Pengetahuan mengelola damar didapat dari warisan nenek moyang mereka sejak 120 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1970 sepanjang jalan lintas Liwa – Krui Kabupaten Liwa memotong Kawasan TNBBS merupakan bekas lahan/kebun orang Krui, yang ditinggalkan dan telah menjadi repong damar (Balai Besar TNBBS, 2020).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dimaknai sebagai sumber daya alam dengan nilai ekonomi, religious, sosial, politik dan budaya di setiap masyarakat desa hutan memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Purwatiningsih, 2022).

2.6. Demografi Masyarakat

Berdasarkan penelitian Chiwaya dan Mzuza (2022) menunjukkan bahwa variabel demografi yaitu jenis kelamin, variabel pendidikan, usia, dan kepemilikan lahan. Menurut Kanguzu *et al.*, (2021) variabel demografi yaitu pendapatan, jarak tempat tinggal dan jarak pasar. Variabel jenis kelamin, variabel pendidikan, usia, kepemilikan lahan, merupakan variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Variabel pendidikan positif dan signifikan secara statistik membuktikan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi dalam pengelolaan kehutanan dan karenanya pendidikan merupakan variabel penting dalam menentukan partisipasi rumah tangga dalam kehutanan.

Kelompok umur 45 - 59 tahun lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan daripada kelompok umur lainnya dan luas lahan yang dimiliki merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan hutan. (Chiwaya *and* Mzuza, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial seperti umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, tingkat pendapatan dan pengalaman bertani tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat (Rosada dkk., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kazungu *et al.*, (2021), factor kases yang dianalisis adalah arak ke jalan utama, kawasan hutan dan lokasi rumah tangga (yaitu di kawasan hutan lindung). Peningkatan waktu berjalan kaki ke jalan utama menurunkan kemungkinan partisipasi sebesar 0,08 poin persentase, dengan menganggap semua faktor lainnya konstan. Di sisi lain, peningkatan jarak berjalan kaki ke kawasan hutan menurunkan kemungkinan partisipasi sebesar 6,8 poin persentase, dengan menganggap semua faktor lainnya konstan.

Data demografi adalah informasi tentang sekelompok orang menurut karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status perkawinan, dan pendapatan (LPPM Universitas Medan Area, 2022). Karakteristik sosial demografi menurut Mukti dkk., (2019) adalah jenis kelamin, umur dan pendidikan. Komposisi usia pada masa produktif dan dewasa memiliki potensi yang besar untuk berperilaku ke arah konservasi TNBBS (Firnanda dkk., 2020). Interaksi sosial masyarakat dengan sumber daya hutan terjadi di kawasan hutan dengan fungsi lindung sudah ada sejak awal tahun 1960an dengan banyaknya migrasi sukarela ke Lampung dan relokasi lokal oleh warga era Orde Lama yang dilakukan melalui pembukaan lahan dan okupasi oleh kelompok etnis dari Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Semendo, Organ, dan Sumatera Utara mendirikan perkebunan kopi (Balai Besar TNBBS, 2020).

Masyarakat miskin umumnya tidak memiliki lahan garapan pribadi, namun mereka tidak dapat menghindari kebutuhan ekonomi sehari-hari (Hakim dkk.,2018). Walaupun tidak diketahui secara pasti bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal mempunyai dampak yang besar terhadap kurangnya kesadaran akan sumber daya hutan, ada kemungkinan bahwa dengan pendidikan yang lebih baik masyarakat akan memahami instruksi dan membaca peraturan. (Hakim dkk., 2018).

Menurut Mulyana (2022), jarak tempat tinggal ke lahan garapan mempengaruhi informasi yang diperoleh dari penyuluhan serta tenaga dan biaya yang akan dikeluarkan oleh petani. Menurut Widyaningsih, dkk. (2019), ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dipengaruhi oleh jarak tempat tinggal dengan hutan antara 2 – 7 km dan hasil hutan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk kayu bakar, bahan makanan, obat, serta pakan ternak.

2.7. Modal Sosial Masyarakat

Modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Azzahra dan Sulandjari, 2022). Nilai yang terdapat dalam konsep kemitraan ini adalah konsep saling percaya, saling menguntungkan dan saling gotongroyong (Hartoyo dkk., 2020). Modal sosial yang ada dalam masyarakat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan, norma dan jaringan, yang akan menggambarkan ikatan komunal yang akan memfasilitasi kesepakatan bersama untuk melestarikan suatu program atau kegiatan, dalam hal ini restorasi hutan (Wulandari *et al.*, 2021a).

Secara umum norma merupakan nilai yang bersifat kongkret sebagai panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat (Azzahra dan Sulandjari, 2022). Memahami sikap masyarakat

merupakan isu kunci untuk konservasi dan pengelolaan kawasan khususnya dari sudut pandang pembangunan ekosistem yang berkelanjutan (Sinthumule, 2021). Modal sosial (khususnya *trust* dan *network*) menjadi salah satu faktor produksi ekonomi yang dapat menghasilkan surplus terhadap perekonomian masyarakat (Bakri dkk., 2021). Rasa tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan dapat terwujud apabila dilibatkan dalam pengelolaan hutan (Purwatiningsih, 2022).

Dalam aspek sosial budaya interaksi sosial masyarakat dengan sumber daya hutan terjadi di kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi TNBBS sudah berlangsung sejak awal tahun 1960-an bersamaan dengan banyaknya transmigrasi spontan datang ke Lampung dan agitasi politik pada masa Orde Lama (Balai Besar TNBBS, 2020). Keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat tidak lepas dari kontribusi modal social (kepercayaan, norma sosial dan jaringan social), namun pengelolaan tersebut belum menunjukkan dampak yang berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, bahkan telah terjadi gangguan hutan akibat kegiatan antropogenik dan konflik vertical (Kailola *et al.*, 2023). Keberadaan lembaga kolaborasi multi-pihak menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan kemitraan konservasi (Raharjo dkk., 2019).

Modal sosial mencakup orang-orang yang bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih efisien dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antar manusia adalah kunci modal social (Lins *et al.*, 2017). Sedangkan jaringan sosial berperan sebagai pengikat, penghubung dan yang menjembatani kelompok agar pengelolaan dapat lebih efektif (Dunn *et al.*, 2021). Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sangat berkaitan dengan modal sosial, yang memiliki ikatan dan norma dalam masyarakat sebagai salah satu unsur penting karena modal sosial mampu mempengaruhi keberhasilan berbagai program berbasis masyarakat (Roslinda *et al.*, 2017).

Kepercayaan dengan etnis yang sama akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang berbeda etnis (Roslinda *et al.*, 2017). Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap modal sosial dalam pengelolaan hutan (Qurniati *et al.*, 2017). Kailola *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dalam pengelolaan kehutanan, masyarakat masih menjunjung tinggi norma-norma sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai kerjasama, kejujuran, pengetahuan yang tidak tertulis aturan, dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang kehutanan. . Kepercayaan merupakan hubungan timbal balik karena, jika masing-masing pihak memiliki harapan yang dapat dipenuhi bersama maka akan mewujudkan kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak (Azzahra dan Sulandjari, 2022).

Menurut (Harrison *et al.*, 2019), orang dan komunitas dengan jaringan yang baik lebih mungkin mencapai hasil yang lebih baik. Kepercayaan dengan etnis yang sama akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang berbeda etnis (Roslinda *et al.*, 2017). Jaringan memberikan pengaruh terhadap ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana hasil penelitian Zeilika dkk., (2021) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi petani dalam pemanfaatan hasil dengan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial dimana nilai positif pada koefisien parameter artinya adalah semakin baik pengelolaan terhadap peningkatan partisipasi petani dalam pemanfaatan hasil maka kesejahteraan ekonomi dan sosial petani semakin meningkat.

Saling percaya dan adanya ikatan dalam masyarakat setempat mempengaruhi kerjasama kelompok berhubungan dengan jaringan sosial (Kailola *et al.*, 2023). Apabila setiap individu memiliki norma, maka rasa saling percaya akan tumbuh dengan sendirinya dan mampu membangun berbagai hubungan, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan maka norma secara otomatis akan menguat pada setiap individu tersebut sehingga akan menguatkan jaringan (Bakri dkk., 2021).

2.8. Persepsi

Konflik pengelolaan sumberdaya hutan disebabkan oleh keterbatasannya sumberdaya hutan, sedangkan kebutuhan masyarakatnya terus meningkat (Senoaji dkk., 2020). Perbedaan persepsi tentang hutan juga menjadi faktor penyebab konflik antara masyarakat dan pihak kehutanan (Saputra dan Dewata, 2018). Konflik horizontal terjadi antar masyarakat, terjadi karena adanya klaim berdasarkan hak atas warisan dan hak atas pengelolaan, sedangkan konflik vertikal terjadi antar masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dengan pemerintah yang melarang adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa seijin dari instansi yang mengelola kehutanan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Seoaji dkk., 2020). Kesalahpahaman mengenai tanah dan anggapan bahwa tanah yang sudah lama digarap suatu saat akan mendapat hak milik dari pemerintah menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa kepemilikan (Hakim dkk., 2018).

Rasa memiliki yang tinggi terhadap kelestarian hutan dan adanya manfaat yang dihasilkan dari hutan tersebut bagi keluarganya adalah faktor penting bagi keberhasilan rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat (Wulandari *et al.*, 2021a). Apabila masyarakat memiliki persepsi positif tentang keberadaan hutan, maka masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap keberadaan hutan tersebut, begitu juga sebaliknya (Aspuan dan Nugraha, 2022). Persepsi yang selaras dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk melancarkan implementasi pada berbagai kegiatan (Agustina dkk., 2018).

Masyarakat yang memiliki persepsi positif adalah masyarakat yang merasakan manfaat dari keberadaan kawasan hutan, persepsi etral disebabkan karena kurang merasakan manfaat dari keberadaan hutan sedangkan persepsi negative masyarakat timbul karena tidak atau belum merasakan manfaat dari keberadaan hutan (Febrina dkk., 2022). Hasil survey persepsi masyarakat menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui status kawasan hutan di sekitar

mereka dan juga tidak pernah mendengar tentang TNBBS, menurut mereka TNBBS adalah kawasan konservasi/lindung sebagai tempat hidup tumbuhan dan satwa liar yang dikelola oleh pemerintah pusat, batas TNBBS dengan lahan garapan mereka belum cukup jelas dan bahkan ada yang tumpang tindih , selanjutnya ada juga yang berpendapat bahwa hutan merupakan tempat untuk buka lahan atau tempat mencari hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai sumber keperluan hidup sehari-hari (Balai Besar TNBBS, 2020).

Persepsi bersifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ada perbedaan penafsiran antar individu satu dengan yang lainnya (Febrina dkk., 2022). Sebagaimana menurut Raharjo dkk., (2019), faktor utama dari keberhasilan kemitraan kehutanan adalah komunikasi. Semakin tinggi pengetahuan maka semakin meningkatnya persepsi dan partisipasi masyarakat (Yulia dkk., 2014). Menurut Puspasari dkk., (2017), program perhutanan sosial termasuk kemitraan kehutanan yang dilaksanakan oleh masyarakat atas keinginannya sendiri akan lebih terjamin dampaknya sehingga bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan.

Kurangnya penyuluhan juga termasuk dalam penghambat kemitraan kehutanan, karena semakin sering mendapatkan penyuluhan maka wawasan pengetahuan penggarap juga meningkat (Utami dan Ratnaningsih, 2018). Berdasarkan hasil penelitian Febrina dkk. (2022), tingkat pengetahuan seseorang rendah maupun sedang bukan berarti pemahaman mereka kurang akan tetapi masyarakat menilai berdasarkan apa yang dilihat dan yang dapat. Perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan (Purwatiningsih, 2022).

2.9. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam kemitraan konservasi untuk pemberdayaan dan untuk pemulihan ekosistem memiliki perbedaan dimana dalam pemberdayaan, partisipasi masyarakat diatur mulai dari tahap perencanaan sampai penandatanganan PKS sedangkan untuk pemulihan ekosistem, partisipasi masyarakat hanya diakomodir pada tahap penyusunan PKS dan penandatanganan PKS sehingga perbedaan ini mungkin akan menimbulkan hasil yang berbeda juga (Raharjo dkk., 2019). Partisipasi yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Deviyanti, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan pendekatan yang baik untuk melindungi hutan dan kawasan hutan. Pengelolaan Hutan Partisipatif menyadari perlunya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sebagai rekan kerja, bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (Chiwaya, and Mzuza 2022).

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal petani, aspek kinerja penyuluhan, dan dukungan sistem sosial kelompok sehingga, modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, menyebabkan terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama (Suparyana dkk., 2022). Partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua bentuk yaitu nyata (uang, harta benda dan tenaga) dan tidak nyata (ide pemikiran, pengambilan keputusan dan representative) ((Deviyanti, 2013). Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan positif yang signifikan antara kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat ($p = 0,015$), serta antara manfaat ekonomi dan keterlibatan masyarakat ($p = 0,003$). Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa pemuda harus secara sengaja terlibat dalam pengelolaan hutan dibandingkan dengan partisipasi saat ini yang didominasi oleh orang tua

(Zande *and* Mzuza, 2022). Partisipasi mampu meningkatkan pendapatann dan menambah informasi, serta memberikan kontribusi untuk memperkuat modal sosial (Valenzuela *et al.*, 2020). Menurut Luswaga (2023), pemanfaatan HHBK merupakan variable yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Akan tumbuh peran aktif masyarakat jika semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat karena adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kawasan (Suyono dkk., 2017). Pendekatan pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif atau berbasis masyarakat membawa masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam (Abukari dan Mwaluosi, 2020). Pemanfaatan getah damar dan pinus yang berada di zona tradisional merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat (Sofyana dkk., 2021).

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak factor. Kesadaran masyarakat dan manfaat ekonomi tampaknya menjadi faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Zande dan Mzuza. 2022). Kesadaran memelihara kawasan hutan telah dipahami oleh masyakat Krui TNBBS, mereka tidak berani menebang pohon damar untuk diolah dan dijual guna mendapatkan uang tunai. Kesadaran masyarakat Krui juga terlihat mereka menanam bibit pohon damar maupun dari jenis lainnya pada lokasi lahan kosong atau pengganti pohon yang tumbang. Masyarakat sudah mengetahui batas antara kawasan TNBBS yang tidak boleh/dilarang dimanfaatkan kayu atau menebang pohon baik pohon damar atau pohon lainnya yang tumbuh di TNBBS (Balai Besar TNBBS, 2020). Ketika ketergantungan masyarakat secara sosial dan ekonomi terhadap kawasan konservasi terpenuhi dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem kawasan konservasi, maka akan muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjaganya kemudian akan muncul kepedulian dan komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi (Purwatiningsih, 2022).

Partisipasi dan pengelolaan bersama diharapkan dapat mendukung kegiatan

konservasi dan menjadi solusi bagi masyarakat dan lingkungan. (Wulandari dkk., 2023). Partisipasi aktif kelompok tani hutan dan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan menentukan keberhasilan pengelolaan hutan dengan skema kemitraan kehutanan (Taufik, 2020).. Pengembangan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesadaran konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kehutanan sehingga masyarakat akan berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan (Purwatiningsih, 2022). Partisipasi dalam perencanaan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sebagai pedoman dan control kegiatan sedangkan partisipasi evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari program yang sudah direncanakan sebelumnya yang dapat memberikan masukan demi perbaikan selanjutnya. (Rosada dkk. 2020).

.3.0. Structural Equation Modeling (SEM)

Jumlah penelitian bidang pendidikan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam penggunaannya yang dilakukan (Alhakim dan Hidayah, 2022). SEM menggabungkan analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel dalam suatu model, seperti antara suatu indikator dengan komponennya atau hubungan antar komponen (Aditya dkk., 2020). Kelebihan metode SEM antara lain asumsi yang lebih fleksibel, kemampuan menangani data yang sulit (deret waktu dengan kesalahan autokorelasi, data anomali, data tidak lengkap), dan kemampuan menangani banyak analisis faktor konfirmatori dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan menggunakan angka yang besar (Gusmiarti, 2020).

Pendekatan SEM digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel (Wahyuni, 2022). Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan terdiri dari beberapa variabel penjas yang dapat diukur secara langsung (Faizah dkk., (2021). SEM merupakan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, atau perantara yang dapat memberikan informasi tentang dua variabel (Juniarto dkk., 2021). SEM secara simultan mengeksplorasi hubungan linier antara variabel yang diamati (indikator) dengan variabel yang tidak diukur secara langsung (variabel laten) (Wahyuni, 2022). SEM digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh dan untuk mengestimasi kekuatan hubungan diantara variabel-variabel dalam model (Juniarto dkk., 2021).

Ada dua metode analisis data dalam pemodelan persamaan struktural yaitu SEM berbasis kovarian dan SEM berbasis varians. SEM berbasis kovarians berbasis *software* Lisrel/AMOS. diolah menggunakan ,SEM berbasis varians diolah menggunakan SmartPLS, dan visual PLS (Yamin, 2023). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi saat menggunakan SEM diantaranya: ukuran sampel, normalitas multivariat, dan multikolinieritas (Aditya dkk., 2020). SEM dapat menguji hipotesis melalui uji hubungan antar-variabel (Alhakim dan Hidayah, 2022). SEM merupakan salah satu teknik multivariat yang akan menunjukkan bagaimana cara merepresentasikan suatu deret hubungan dalam suatu diagram jalur (Anuraga dkk., 2017).

3.1. *Partial Least Square (PLS)*

Salah satu metode analisis data yang berkembang pesat saat ini adalah *Pertial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (Sanistasya dkk., 2022). Structural SEM-PLS merupakan salah satu teknik analisis statistika yang mengkombinasikan multiple regression analysis dan factor anlysis untuk mengestimasi beberapa persamaan secara simultan dengan pendekatan bootstrap (Anuraga dkk., 2017). Menurut Chin (2000), PLS-SEM dapat digunakan dengan

jumlah minimal sampel 30-100. PLS-SEM baik digunakan ketika ukuran sampel kecil namun akan semakin lebih baik jika sampel yang digunakan semakin besar (Heir *et al.*, 2014). PLS-SEM dapat digunakan untuk mengukur sampel dengan jumlah yang sedikit (Marliana, 2020).

Analisis PLS bertujuan agar peneliti dapat memperoleh variabel laten untuk tujuan prediksi (Andini, 2020). PLS dirancang untuk membuat prediksi, mengidentifikasi variabel yang membantu memprediksi hasil, menjelaskan hubungan antar konstruk, dan menyoroti konsep (Faizah dkk., 2021). Model PLS terdiri dari model struktural (yang menggambarkan hubungan pengaruh antar variabel penelitian atau hipotesis penelitian yang diajukan) dan model pengukuran (yang menggambarkan hubungan antar variabel dan item pengukuran yang mengukurnya) (Yamin, 2023). Jika nilai akar kuadrat AVE (*Cross Loading*) masing-masing konstruk lebih besar dari korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya, maka variabel dinyatakan valid berdasarkan *validitas divergen* (Suradi dan Windarti, 2020). Hasil penelitian Zeng *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa alasan penggunaan PLS sebagai analisis statistik pada jurnal tersebut adalah karena *small sample size* ada 81 jurnal dari 139 jurnal (58.27%).

Partial Least Squares (PLS) merupakan salah satu alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang menganalisis hubungan antar konstruk dalam konteks linier maupun nonlinier dengan menggunakan indikator reflektif, formatif, dan *multiple-effects model* (Faizah dkk., 2021). Pengukuran model eksternal bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel posterior dengan indikator yang ada, antara lain validitas konvergen, reliabilitas komposit, meliputi tiga tahap untuk menguji nilai validitas divergen (Wahyuni, 2022).

Uji validitas menunjukkan bahwa *loading faktor* nilai lebih besar dari 0,7 dan nilai AVE lebih besar dari 0,5 dinyatakan valid dan reliabel, pengujian dinyatakan reliabel dengan reliabilitas komposit dan nilai *Cronbach alpha* lebih

besar dari 0,7 (Muhtarom dkk., 2022). Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila mempunyai nilai reliabilitas komposit $\geq 0,70$ (Suyoto dkk., 2019). Jika keluaran nilai SmartPLS AVE 0,50 atau lebih tinggi berarti semua variabel lolos, dan nilai perhitungan kriteria Fornell-Rucker (akar AVE) antar variabel lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya (Wahyuni, 2022). Semakin tinggi nilai outer loading pada suatu variabel menunjukkan bahwa indikator-indikator pada variable tersebut memiliki banyak kesamaan (Marliana, 2020).

PLS didesain untuk memprediksi dan mengidentifikasi variabel yang berguna agar dapat memprediksi hasil dan dapat menjelaskan hubungan antar variabel (Faizah dkk., 2021). Model spesifikasi pada PLS-SEM dilakukan dengan membuat sebuah diagram jalur yang menggambarkan hubungan antara variabel eksogen dan endogen (*inner model*) dan hubungan antara variabel eksogen dan endogen terhadap indikatornya masing-masing (*outer model*) (Marliana, 2020). PLS terdiri atas hubungan eksternal (*outer model*) dan hubungan internal (*inner model*), dimana model internal menggambarkan hubungan antar variabel, dan model eksternal menggambarkan hubungan setiap indikator dengan variabel latennya (Faizah dkk., (2021).

Evaluasi kesesuaian model pengukuran ini menitikberatkan pada validitas dan reliabilitas pengukuran indikator (Marliana, 2020). Pengujian *outer model* bertujuan untuk melihat *validity* dan *reliability* suatu model yang akan dilihat dari pengaruh *factor loading*, *Average Variance Extratcted* (AVE), dan *discriminant validity*, serta *composite reliability* (Pratiwi dkk., 2022).

Metode bootstrap dikembangkan sebagai alat untuk membantu mengurangi ketidak andalan penggunaan distribusi normal dan penggunaannya (Sholihah dan Salamah, 2015). PLS tidak mengasumsikan data terdistribusi normal, PLS mengandalkan prosedur *bootstrapping* (Faizah dkk., 2021). Pengujian hipotesis menggunakan software *Partial Least Squares* (PLS) dilakukan dengan uji statistik untuk setiap jalur, dan hasil signifikansi koefisien parameter dihitung

menggunakan metode bootstrap (Pratiwi dkk., 2022). Hipotesis untuk memastikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antar komponen (Aditya dkk., 2020).

Uji hipotesis dengan menggunakan PLS dengan uji statistik pada masing-masing jalur, dan hasil signifikansi dari koefisien parameter yang dihitung dengan metode *bootstrapping* (Pratiwi dkk., 2022). Hipotesis ditolak apabila nilai t-statistic pada model penelitian ini lebih kecil dari 1.96 ($t\text{-statistics} < 1.96$) atau hipotesis diterima apabila nilai t statistic lebih besar dari 1.96 ($t\text{-statistics} > 1.96$) (Susanto dkk., 2020). Nilai estimasi pada hubungan antara jalur dalam model struktural harus signifikan dengan kriteria pengujian pada hipotesis adalah tingkat signifikansi sebesar 5%, nilai T-statistik 1,96 dan nilai P-value lebih kecil sama dengan 0,05 (Pratiwi dkk., 2022).

3.2. Second Order PLS SEM

Selain jenis model pengukuran reflektif dan formatif, perhatikan juga apakah model pengukuran yang Anda kembangkan merupakan model orde pertama, yaitu apakah setiap variabel diukur secara langsung melalui serangkaian item pengukuran, ataukah berupa variabel atau model second order berarti bahwa variabel diukur secara bertahap melalui serangkaian dimensi/subvariabel, kemudian setiap dimensi/subvariabel diukur kembali melalui serangkaian item pengukuran (Yamin, 2023).

Partial Least Square- Structural Equation Model (Second Order Construct Analysis) dengan bantuan *software Smart PLS.4.0. Second Order Construct (SOC)* merupakan ukuran SEM yang terdiri dari dua tingkat hubungan variabel laten tingkat pertama sebagai indikator variabel laten tingkat kedua (Dewi dkk., 2015). SOC juga menurut Rahayu (2018), merupakan hubungan teoritis antara variabel laten atau konstruk tingkat tinggi dan dimensi konstruk yang mendasarinya, yang dapat bersifat reflektif dan formatif.

Peneliti sering dihadapkan pada variabel observasi yang dipengaruhi oleh variabel lain (Dewi dkk., 2015). Variabel laten dengan banyak indikator memungkinkan peneliti melakukan uji statistik untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis (Roni *et al.*, 2015). Model *second order* telah terbukti signifikan secara statistik dalam mengukur semua faktor dalam konstruk yang menunjukkan hubungan (Mia *et al.*, 2022).

3.3. Software Smart PLS

Saat ini software SmartPLS-3 menjadi aplikasi paling populer untuk menganalisis data penelitian sosial dan bisnis untuk melihat pengaruh sebab akibat. Namun, masih banyak peneliti yang masih mengalami kendala dalam memahami aplikasi pengolahan data Smart-PLS 3.0 baik dari sisi teori atau konsep maupun pengoperasian aplikasinya (Astuti dan Bakri, 2021). Software ini relatif relatif mudah digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas serta hipotesis mengenai efek langsung, tidak langsung, dan moderasi (Sarstedt *and* Cheah, 2019). Kelemahan smart PLS terkait distribusi data yang tidak terkendali dapat diatasi dengan menggunakan teknik resampling (bootstrap) (Harahap, 2018).

Kelebihan Smart-PLS adalah tidak memerlukan data berdistribusi normal dan dapat digunakan dengan jumlah sampel yang sedikit, sedangkan kekurangan dari Smart-PLS adalah distribusi datanya tidak dapat diatur (Sanistasya dkk., 2022). Kekurangan dari SmartPLS adalah tidak semua jenis SEM dapat dilakukan dengan software ini, karena SmartPLS cocok digunakan pada sampel yang kecil dan tidak cocok digunakan pada sampel yang besar (Purwanto dkk., 2021). Software Smart PLS digunakan untuk pengolahan data untuk pemodelan persamaan struktural atau biasa disingkat SEM (Sarstedt *and* Cheah, 2019). Smartpls digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas serta memastikan data penelitian memenuhi kualitas data (Astuti dan Bakri, 2021). Penerapan PLS-

SEM juga dikenal dalam bidang penelitian ilmiah lainnya seperti pertanian, ilmu lingkungan, geografi, dan kedokteran (Sarstedt *and* Cheah, 2019).

Jika peneliti dan instruktur sudah familiar dengan software Smart PLS maka instruktur akan lebih mudah melakukan penelitian (Tambun dkk., 2022).

Menurut Chin (2000), PLS-SEM dapat digunakan dengan jumlah sampel minimal 30 sampai 100. PLS-SEM cocok digunakan dengan ukuran sampel yang kecil, namun lebih baik bila menggunakan sampel yang lebih besar (Hair *et al.*, 2014). PLS-SEM dapat digunakan untuk mengukur sampel kecil (Marliana, 2020). Penelitian yang menggunakan metode statistik SEM masih didominasi oleh penulis asing (AlHakim dan Hidayah, 2022).

Keunggulan SmartPLS adalah mudah digunakan dan harga software lebih kompetitif (Purwanto dkk., 2021). Pengoperasian SmarPLS sangat sederhana, pengolahan datanya tidak terlalu sulit, dan asumsi yang diperlukan juga tidak terlalu sulit (Rahayu dan Sari, 2021). memerlukan data yang berdistribusi normal dan dapat digunakan dengan jumlah sampel yang sedikit,, sedangkan kekurangan dari Smart-PLS adalah distribusi datanya tidak dapat disesuaikan (Sanistasya dkk., 2022).

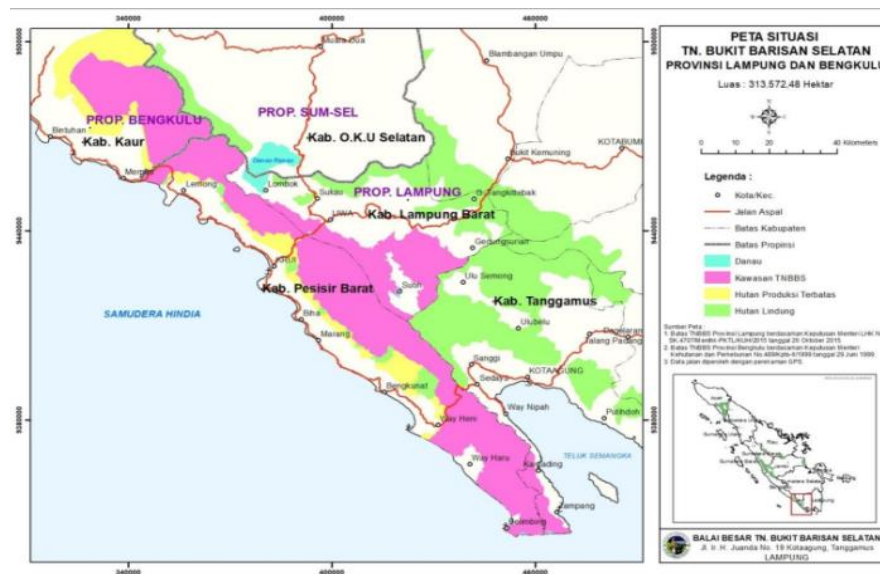
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya (valid) dengan mengeluarkan indicator yang tidak memenuhi convergent validity atau bernilai kurang dari 0,5. Uji validitas yang dilakukan dengan melihat nilai square root of average variance extracted (AVE) untuk menguji validitas dari variabel laten, selanjutnya uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukurannya diulangi dua kali atau lebih. Nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,7 untuk dapat diterima dan memenuhi kriteria discriminant. (Pratiwi dkk., 2022).

Uji instrumen penelitian menggunakan software Smart PLS 4.0. Penggunaan software statistik dalam penelitian sangatlah penting, terutama pada penelitian yang berbasis kuantitatif (Sitorus, 2022). Software Smart PLS merupakan software yang sangat mudah digunakan (Darwin dan Umam, 2020). Menurut Lestari dan Rahayu, (2019) . Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data menggunakan *software SmartPLS* adalah menghitung nilai *outer model* (*Convergent validity, composite reliability, AVE dan Discriminant validity*) menghitung nilai *inner model* (*coefficient of determination (R²), effect size (f²), goodness of fit (GoF), cross validated redundancy (Q²), dan path coefficients*) dan pengujian hipotesis.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2023 di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Lokasi dipilih karena status TNBBS sebagai *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) yang pada tahun 2011 UNESCO memasukkan Situs warisan alam dunia TNBBS sebagai salah satu *List In Danger* di dunia. Pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah dari hulu dan hilir dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari *Civil Society Organization* (CSO), universitas setempat, *local champion*, para aktivis, dan staf resort (Wiratno, 2018). Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. berikut :



Gambar 2. Peta lokasi penelitian (Sumber: Balai Besar TNBBS, 2020).

3.2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. Berikut :

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

No	Jenis Alat	No	Jenis Bahan
1.	Laptop <i>Lenovo G40-30</i>	1.	Peta Kawasan TNBBS
2.	<i>Software Smart PLS 4.0 Student License</i>	2.	Data Statistik Kawasan TNBBS
3.	<i>Software Microsoft Office 2010</i>		
4.	Kuesioner		

3.3. Metode

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam rangka mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang diperoleh secara ilmiah dan sistematis yang diperlukan dalam penelitian. Metode penelitian ditentukan sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan hasil terkait penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (Garaika dan Darmanah, 2019). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah mendapatkan izin kemitraan kehutanan di TNBBS yang terbagi pada wilayah kelola BPTN Wilayah I Semaka dan BPTN Wilayah II Liwa.

2. Teknik Pengambilan Sampel Responden

Teknik pengambilan sampel responden merupakan cara menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel responden terbagi atas dua wilayah bidang pengelolaan yaitu kelompok

kemitraan konservasi di BPTN wilayah I Semaka dan BPTN Wilayah II Liwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Semaka (BPTN I Semaka)

Peneliti menggunakan teknik *Non Probability Sampling* sampling jenuh untuk menentukan sampel responden di BPTN wilayah I Semaka. Sampling jenuh (sensus) menurut Garaika dan Darmanah (2019) merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel sensus dijamin kesahihannya (Wulandari, et al. 2021b).

Rincian sampel responden dapat dilihat pada table 2. berikut:

Tabel 2. Sampel responden pada BPTN Wilayah I Semaka.

No.	Nama KTH	Luas (Ha)	Pekon	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Anggota	Jumlah Sampel
1.	Damar Pak Tebak Kami	130,39	Sukarame	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	13	13
2.	Kubu Gedung Jaya Lestari	29,42	Sumur Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat	28	28
Jumlah						41	41

Sumber: Statistik BBTNBBS, 2023.

b. Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Liwa (BPTN II Liwa)

Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan menjadi target penelitian di BPTN wilayah II Liwa. Rumus yang digunakan adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel
- N : Jumlah populasi
- e : Batas toleransi kesalahan (10%)

Terdapat 7 kelompok kemitraan kehutanan dengan jumlah anggota kelompok lingkup BPTN wilayah II Liwa adalah 116 (Statistik BBTNBBBS, 2022). Berdasarkan rumus diatas, peneliti mendapatkan jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 54 responden. Rumus slovin dipilih karena jumlah populasi pada BPTN Wilayah II Liwa diketahui. Di lokasi ini tidak mampu menggunakan metode sensus dikarenakan ada keterbatasan kemampuan SDM. Peneliti menggunakan batas toleransi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000 (Sihaloho, 2016).

Penentuan jumlah responden pada masing-masing kelompok maksimal 50% dari jumlah kelompok. Sedangkan dalam penentuan anggota kelompok yang menjadi responden menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan *purasive*. *Sampling purasive* menurut Garaika dan Darmanah (2019), merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya 1) lokasi tempat tinggal berada satu kecamatan dengan lahan garapan 2) lokasi mudah diakses oleh peneliti 3) sering melakukan pemungutan HHBK dalam kawasan TNBBS. Rincian jumlah sampel responden dapat dilihat pada table 3. berikut:

Tabel 3. Sampel responden pada BPTN Wilayah II Liwa

No.	Nama KTH	Luas (Ha)	Pekon	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Anggota	Jumlah Sampel
1.	Tebak Bunuk Makmur	16	Ulu Krui	Way Krui	Pesisir Barat	13	7
2.	Tebak Bunuk Lestari	13,75	Gunung Kemala	Way Krui	Pesisir Barat	10	5
3.	Tengkulak Jaya	22,50	Gunung Kemala	Way Krui	Pesisir Barat	20	10
4.	Mandapalu	68,48	Penggawa V Ulu	Karya Punggawa	Pesisir Barat	19	10
5.	Damar Indah jaya	87	Labuhan Mandi	Way Krui	Pesisir Barat	11	5
6.	Paseban	40,10	Penengahan	Karya Punggawa	Pesisir Barat	12	6
7.	Cinta Damai	82	Kubu Perahu	Balik Bukit	Lampung Barat	31	11
Jumlah						116	54

Sumber: Statistik BBTNBBBS, 2022.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dikelompokkan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif (Garaika dan Darmanah, 2019). Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara yang diskoringkangkan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai tujuan dari dilakukannya penelitian. Untuk sumber data terdiri data primer dan data sekunder.

Menurut Dwiastuti (2017) dan Syaf dkk., (2022), data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden dan data sekunder merupakan data yang bersumber dari laporan hasil kegiatan pada lokasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik penelitian. Data primer dalam penelitian ini yang berhubungan dengan variabel demografi, persepsi, modal sosial dan partisipasi masyarakat terhadap kemitraan konservasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian terkait data tentang TNBBS, potensi di lokasi penelitian dan data-data pendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk menerapkan metode ilmiah pada pengumpulan data primer dan sekunder secara sistematis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Menurut Abdilah (2022) dan Wahyuni (2022), kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban dari responden dan diolah hasilnya. Kuisisioner bersifat semi terbuka yaitu jawaban sudah disediakan berupa pilihan ganda namun tergantung situasi responden, disediakan ruang untuk menjawab pertanyaan yang tidak termasuk dalam jawaban Variabel-variabel dalam kuesioner kini diukur menggunakan skala Likert (Hanafiah dkk., 2020). Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 1 hingga 6 untuk variabel

demografi dan dari 1 hingga 3 untuk variabel modal sosial, persepsi dan partisipasi.

Sedangkan data sekunder menurut Dwiastuti (2017) dan Abdillah (2022), diperoleh dengan cara studi literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen dari instansi terkait, laporan-laporan hasil kegiatan, hasil penelitian terkait, dan data lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Studi literatur menurut Wahyuni (2022) merupakan upaya untuk mendapatkan literatur yang terkait dengan penelitian dan permasalahan yang akan diselesaikan disebut studi literatur. Studi literatur diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Raharjo dkk., (2019) bahwa studi literatur dilaksanakan untuk mendokumentasikan pembelajaran (*lessons learned*) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kemitraan kehutanan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan salah satu teknik analisis estimasi model persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (kuadrat) (*Second Order*) dengan bantuan *software Smart PLS.4.0*. *Second Order* merupakan pengukuran SEM yang terdiri dari hubungan variabel laten dua tingkat dengan tingkat pertama sebagai indikator variabel laten tingkat kedua (Dewi dkk., 2015). *Second Order* juga menurut Rahayu (2018) adalah hubungan teoritis antara variabel laten atau konstruk tingkat tinggi dengan dimensi konstruk yang mendasarinya, yang dapat bersifat refleksif dan formatif. Tujuan dari *Partial Least Square* (PLS) adalah untuk memprediksi pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y dan menjelaskan ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut (Suriana, dkk. 2022).

Aplikasi PLS-SEM sudah dikenal pada bidang penelitian ilmiah lainnya seperti pertanian, ilmu lingkungan, geografi dan kedokteran (Sarstedt and Cheah,

2019). Hal tersebut karena terdapat instrumen/variabel yang dianalisis sesuai tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar mengenai hubungan dari instrumen/variabel yang telah diteliti. SEM digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang memiliki hubungan. Sebagaimana menurut Wahyuni (2022), untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem informasi, sebaiknya digunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM).

Menurut Chin (2000), PLS-SEM dapat digunakan dengan jumlah minimal sampel 30-100. PLS-SEM baik digunakan ketika ukuran sampel kecil namun akan semakin lebih baik jika sampel yang digunakan semakin besar (Heir *et al.*, 2014). PLS-SEM dapat digunakan untuk mengukur sampel dengan jumlah yang sedikit (Marliana, 2020). Penelitian menggunakan metode statistik SEM masih didominasi oleh penulis dari mancanegara (AlHakim dan Hidayah, 2022). Dengan demikian, permodelan variabel laten demografi, modal sosial, persepsi dan partisipasi responden pada penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM.

6. Instrumen / Variabel Penelitian

Ada 4 (empat) variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini yang dinyatakan dalam skala ordinal dalam 5 (lima) peringkat untuk demografi masyarakat dan dalam skala ordinal 3 (tiga) untuk modal sosial, persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kemitraan kehutanan. Peneliti memilih variabel tersebut dikarenakan dugaan sementara dalam penelitian bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program kemitraan konservasi. Pendekatan SEM digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel (Wahyuni, 2022). Model pengukuran untuk variabel laten demografi dapat dilihat pada Tabel 4. Berikut.

Tabel 4. Instrumen pengukuran indikator demografi

Umur (A1)	Jumlah tanggungan (A2)	Pekerjaan Utama (A3)	Penghasilan perbulan X Rp.1.000,- (A4)	Jarak tempat tinggal ke lahan garapan (TNBBS) (A5)	Jarak tempat tinggal ke pusat desa (A6)	Suku (A7)	Skoring
15-24	0	Tidak ada	< Rp. 1.000	< 1 km	< 1 km	Pribumi	1
25-34	1	Buruh/ petani	Rp. 1.000- Rp. 2.999	1-5 km	1-5 km	Pendatang	2
35-44	2	Ojek/	Rp. 3.000- Rp. 4.999	6-10 km	6-10 km	Campuran	3
45-54	3	Berdagang/ wiraswasta	Rp. 5.000- Rp. 6.999	11-15 km	11-15 km		4
>55	≥4	PNS	> Rp. 7.000	>15 km	>15 km		5

Sumber : Wulandari dkk., (2022); Bakri dkk., (2021); ; Mukti dkk., (2019); Pulungan dkk., (2015); yang dimodifikasi.

Dalam mengembangkan model pengukuran variabel laten untuk modal sosial responden menggunakan 16 (enam belas) kalimat dengan 3 pilihan jawaban tingkatan ordinal yang dapat dilihat pada Tabel .5 berikut :

Tabel 5. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (kepercayaan).

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
B1	Saya percaya dengan orang yang memiliki latar belakang/etnis yang sama			
B2	Saya percaya dengan orang yang memiliki latar belakang/etnis yang berbeda			
B3	Saya percaya dengan aparat pemerintah (TNBBS)			
B4	Saya percaya dengan tokoh masyarakat/adat			
B5	Saya percaya dengan pihak luar (LSM/Swasta)			
B6	Saya percaya jika ada yang meminjam uang dengan saya			
B7	Di sini gampang dan tidak perlu was-was untuk menitipkan anak kepada tetangga yang bukan saudara			

Ket: 1 = Tidak; 2 = Ragu-ragu; 3 = Percaya

Sumber : Bakri dkk., (2021); Suparyana dkk., (2022); Azzahra dkk., (2022) yang dimodifikasi.

Tabel 6. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (norma/nilai).

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
B8	Tata aturan harus tertulis			
B9	Tata aturan tidak harus tertulis			
B10	Saya harus bersikap jujur kepada siapapun			
B11	Saya harus membantu tetangga yang mendapat musibah walaupun sikapnya buruk			
B12	Saya marah jika satwa mengganggu lahan garapan saya di TNBBS			

Ket: 1 = Tidak; 2 = Ragu-ragu; 3 = Ya, harus.

Sumber : Bakri dkk., (2021); Suparyana dkk., (2022); Azzahra dkk., (2022) yang dimodifikasi.

Tabel 7. Instrumen pengukuran indikator modal sosial (jaringan).

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
B13	Penting bekerjasama dengan pemerintah (TNBBS)			
B14	Penting bekerjasama dengan LSM/Swasta			
B15	informasi secara sukarela terkait pemasaran hasil tani saya			
B16	Diluar kerabat, saya punya banyak memiliki teman untuk bercerita/curhat/keluh kesah			

Ket: 1 = Tidak; 2 = Ragu-ragu; 3 = Ya, Penting.

Sumber : Bakri dkk., (2021); Suparyana dkk., (2022); Azzahra dkk., (2022) yang dimodifikasi.

Dalam mengembangkan model pengukuran variabel laten untuk persepsi responden menggunakan 6 (enam) kalimat dengan 3 (tiga) pilihan jawaban tingkatan ordinal yang dapat dilihat pada Tabel 8. berikut :

Tabel 8. Instrumen pengukuran indikator persepsi masyarakat

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
C1	Keberadaan Kawasan TNBBS punya manfaat ekologi/kelestarian lingkungan yang besar			
C2	Kemitraan kehutanan hanya menguntungkan TNBBS saja			
C3	Kemitraan kehutanan sama-sama menguntungkan penggarap dan kelestarian TNBBS			
C4	Saya merasakan manfaat ekonomi/untuk penghidupan dengan adanya keberadaan kawasan TNBBS			
C5	Saya merasakan ada pencerahan setelah mendapatkan informasi tentang kemitraan kehutanan			
C6	Dalam program kemitraan kehutanan, saya menyadari pentingnya memenuhi kewajiban yang setara dengan hak yang ingin kita dapatkan			

Ket: 1 = Tidak; 2 = Ragu-ragu 3 = Ya,

Sumber : Febrina dkk., (2022) yang dimodifikasi.

Model pengukuran variabel laten untuk partisipasi responden menggunakan 6 (enam) kalimat dengan 3 (tiga) pilihan jawaban tingkatan ordinal yang dapat dilihat pada Tabel .9 berikut :

Tabel 9. Instrumen pengukuran indikator partisipasi

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
D1	Saya harus bergabung dengan kelompok tani hutan untuk meningkatkan pendapatan			
D2	Jika saya bergabung dalam kelompok, saya harus dapat memberi manfaat bagi kelompok			

D3	Saya harus turut menjaga kawasan TNBBS sebagai salah satu sumber matapencaharian saya dengan melakukan penanaman pohon
D4	Saya wajib turut melakukan upaya pelestarian hutan
D5	Kemitraan kehutanan untuk kemandirian masyarakat harus tercapai
D6	Saya harus ikut berpartisipasi jika terjadi konflik satwa di daerah saya

Ket: 1 = Tidak; 2 = Ragu-ragu; 3 = Ya

Sumber : Deviyanti dkk., (2013); Rosada dkk., (2022) yang dimodifikasi.

Model struktural dan pengukuran (model spesifikasi) yang diusulkan digambarkan pada Gambar.3. sedangkan persamaan model adalah sebagai berikut: (Suriana, dkk. 2022).

$$\eta_{mx1} = \beta_{mxm} \eta_{mx1} + \Gamma_{m \times n} \xi_{nx1} + \zeta_{mx1}$$

Keterangan:

η : Matriks konstruk laten endogen ($m \times l$)

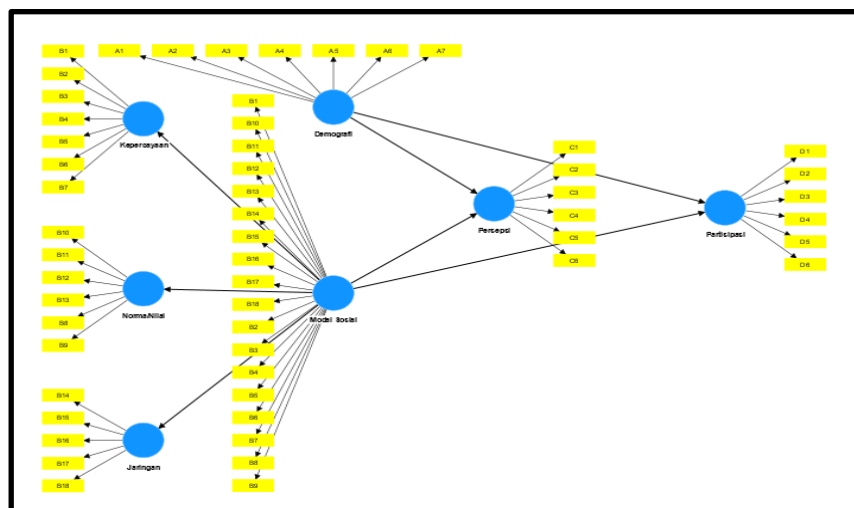
β : Koefisien matriks variabel endogen ($m \times m$)

Γ : Matriks konstruk laten eksogen ($m \times n$)

ξ : Koefisien matriks variabel eksogen ($m \times m$)

ζ : *Inner model* residual matriks ($n \times l$)

m : Banyaknya variabel laten eksogen



Gambar 3. Model algoritma *second order* PLS – SEM yang diusulkan.

7. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian menggunakan software Smart PLS 4.0. Penggunaan software statistik dalam penelitian sangatlah penting, terutama pada penelitian yang berbasis kuantitatif (Sitorus, 2022). Software yang sangat *user-friendly* atau mudah digunakan adalah *software Smart PLS* (Darwin dan Umam, 2020). Menurut Sarstedt *et al.*, (2021) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan dan kualitas kompetitif untuk konstruksi sasaran seperti niat perilaku adalah tujuan umum dari analisis menggunakan PLS-SEM. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data menggunakan *software SmartPLS* Menurut Lestari dan Rahayu, (2019) adalah menghitung nilai *outer model* (*Convergent validity*, *composite reliability*, *AVE* dan *Discriminant validity*) menghitung nilai *inner model* (*coefficient of determination* (R²), *effect size* (f²), *goodness of fit* (GoF), *cross validated redundancy* (Q²), dan *path coefficients*) dan pengujian hipotesis.

a. Evaluasi Kesesuaian Model Pengukuran (Evaluasi model PLS)

PLS terdiri atas hubungan eksternal (*outer model*) dan hubungan internal (*inner model*), dimana model internal menggambarkan hubungan antar variabel, dan model eksternal menggambarkan hubungan setiap indikator dengan variabel latennya (Faizah dkk., (2021). Evaluasi kesesuaian model pengukuran ini menitikberatkan pada validitas dan reliabilitas pengukuran indikator (Marliana, 2020). Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ¹

Evaluasi Outer Model

Pengujian outer model bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada suatu model pengukuran (Pratiwi dkk., 2022). Pengukuran model eksternal dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran (kuesioner) yang digunakan sesuai untuk pengukuran (valid dan reliabel)

(Wahyuni, 2022). Pengukuran *outer model* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Indicator Reliability* (Factor loading), *Composite Reliability*, *Convergent validity* (AVE), dan *Discriminant validity* (HTMT, *Fornell – Larcker criterion* dan *Cross loadings*). Menurut Faizah *et al.*, (2021) pada *outer model* dengan pengukuran reflektif, yang harus diperhatikan adalah :

1. *Indicator Reliability* : *Indicator Reliability* diukur dengan melihat dari nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* > 0,5 maka diterima. Nilai *outer loading* semakin tinggi menunjukkan bahwa indikator pada suatu konstruk memiliki banyak kesamaan (Marliana, 2020).
2. *Composite Reliability* : *Composite Reliability* mengukur konsistensi indikator-indikator yang digunakan dalam model pengukuran reflektif. Pengukurannya reflektif artinya jika ada perubahan dari satu indikator maka akan menyebabkan perubahan pada indikator lainnya. Nilai *Composite Reliability* > 0,7 maka diterima. Rentang nilai *Composite Reliability* dari 0 sampai 1, jika nilai tinggi maka reliabilitas tinggi (Marliana, 2020). Dalam uji reliabilitas terdapat uji *composite reliability* dan *cronbach;s alpha*, nilai dari uji tersebut dapat dikatakan reliabel apabila diatas 0.7 (Muhtarom dkk., 2022).
3. *Convergent Validity* : Uji validitas yang dilakukan dengan melihat nilai *square root of average variance extracted* (AVE) untuk menguji validitas dari variabel laten (Pratiwi dkk., 2022) . Ukuran dari *Convergent Validity* adalah nilai *average varianve extracted* (AVE) dengan nilai $AVE \geq 0,5$ menunjukkan *convergent validity* yang baik. Nilai *convergent validity* secara umum dapat diukur dengan nilai *Average Variance Ectracted* (AVE) >0.5 dengan artian jika nilai $AVE < 0.5$ bearti secara rata-rata (50%) terdapat kekeliruan pada varians yang dijabarkan oleh konstruk (Marliana, 2020).

4. *Diskriminan Validity* : Pengukuran validitas diskriminan bertujuan untuk menguji seberapa jauh suatu variabel laten berbeda dengan variabel lainnya yang dapat dilihat dari nilai *cross loading* dan *fornell-larcker criterion* (Wahyuni, 2022). *Discriminant Validity* dievaluasi melalui *cross loading*. Jika hubungan antara indikator dengan konstraknya lebih tinggi dari hubungan dengan konstruk yang lain, maka konstruk tersebut memprediksi dengan lebih baik dari lainnya. *Discriminant validity* dapat diukur dengan nilai *cross loadings* pada variabel indikator dengan nilai *outer loading* variabel indikator lebih besar dari variabel indikator terhadap konstraknya (Marliana, 2020).

Evaluasi Inner Model

Inner model adalah model yang digunakan untuk memprediksi sebab akibat dari hubungan antar variabel laten (Muhtarom *et al.*, 2022). Menurut Wahyuni, (2022), perhitungan analisis inner model memperhatikan setiap nilai berdasarkan pengukuran nilai *coefficient of determination* (R²), *effect size* (f²), dan *Goodness of Fit* (GoF).

1. *Coefficient of determination* (R²): Perhitungan *coefficient of determination* dilakukan untuk mengetahui varian tiap konstruk. Nilai R square > 0,67 dinyatakan kuat, > 0,33 moderat, dan > 0,19 lemah (Aditya dkk., 2020).
2. *Effect size* (f²): Perhitungan *effect size* untuk dapat memprediksi pengaruh dari suatu variabel tertentu terhadap variabel lainnya dengan nilai ambang batas 0,02 (kecil), 0,15 (menengah), dan 0,35 (besar) (Hussain *et al.*, 2021).
3. *Goodness of Fit* (GoF): Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, maka model seharusnya memiliki *Goodness of Fit* yang baik (Faizah dkk., 2021). Menurut Hair *et al.*, (2017) indeks kecocokan model memiliki kemungkinan dapat menilai seberapa baik

struktur model yang dihipotesiskan untuk mengetahui kesalahan spesifikasi model.

b. Evaluasi Kesesuaian Model Struktural

Evaluasi model struktural pada penelitian ini terdiri dari pengujian kolinieritas (Inner VIF), pengujian kesesuaian hubungan pada model struktural, dan pengujian mediasi variabel. Nilai VIF harus lebih dari 0.2 dan lebih kecil dari 5. Jika hasil pengukuran VIF kurang dari 0,2 dan lebih dari 5, konstruk harus dipertimbangkan untuk dihapus atau digabung dengan konstruk lain (Marliana, 2020).

Pengujian kesesuaian hubungan pada model struktural (Uji Hipotesis)

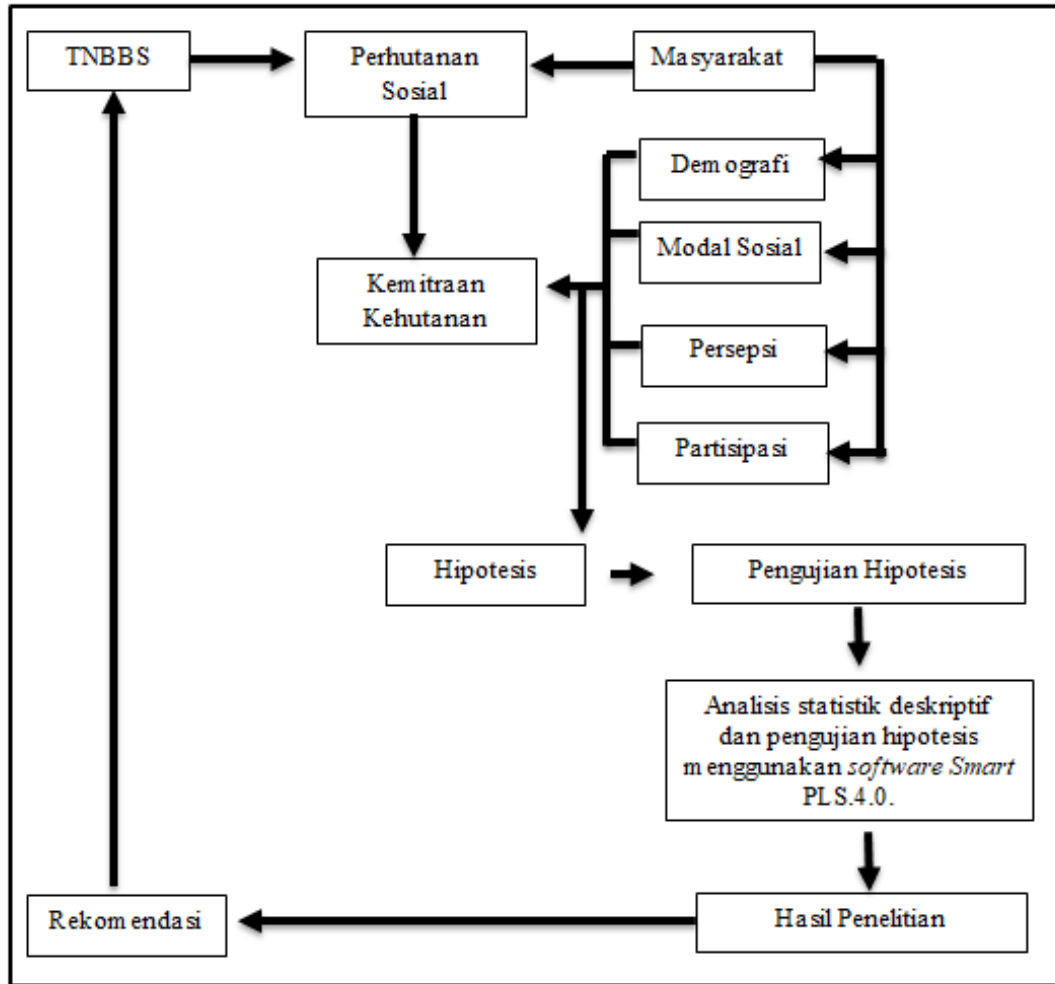
PLS tidak mengasumsikan data terdistribusi normal, PLS mengandalkan prosedur *bootstrapping* (Faizah dkk., 2021). Pengujian hipotesis menggunakan software *Partial Least Squares* (PLS) dilakukan dengan uji statistik untuk setiap jalur, dan hasil signifikansi koefisien parameter dihitung menggunakan metode *bootstrap* (Pratiwi dkk., 2022). Pengujian hipotesis diperlukan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat T-Statistik dan jika *P-values* <0,05 hasilnya diterima.

Pengujian mediasi variabel

Menurut Muhtarom *et al.*, (2022), uji mediasi dikelompokkan menjadi 3 yaitu : *Non mediation* jika hubungan variabel eksogen dan endogen positif dan variabel mediasi negatif, *Full Mediation* terjadi jika variabel eksogen, endogen negatif dan variabel mediasi positif, *Partial Mediation* terjadi jika variabel eksogen dan endogen positif dan variabel mediasi juga positif atau jika *P Values* pada *Specific Indirect Effect* > 0.05 maka nilainya negatif.

3.4 . Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dirancang untuk membantu penulis dalam melakukan tahapan analisis secara sistematis sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Bentuk kerangka penelitian disajikan pada Gambar 4. berikut :



Gambar 4. Kerangka penelitian.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat disekitar kawasan dengan permasalahan terkait pemungutan HHBK. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut KLHK menerbitkan program PS yang disebut kemitraan kehutanan pada kawasan konservasi. Mengetahui efektivitas kemitraan kehutanan dari perseptif masyarakat sebagai pemegang izin adalah hal yang

harus dilakukan. Demografi dan modal sosial masyarakat perlu diketahui apakah memiliki pengaruh terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat peserta program kemitraan kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan oleh peneliti dengan analisis statistik deskriptif menggunakan *software Smart PLS.4.0.* yang hasilnya dapat memberikan rekomendasi kepada pengelola TNBBS sebagai upaya efektivitas dan optimalisasi program kemitraan kehutanan khususnya di TNBBS.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 .Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hipotesis yang telah diukur, model *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan yaitu:

$$n_1 = 0.291 \xi_1 + (-0.060) \xi_2 + \zeta_1$$

$$n_2 = 0.124 \xi_3 + 0.447 \xi_4 + 0.504 n_1 + \zeta_2$$

Persamaan model *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) tersebut menyatakan bahwa jika variable persepsi (n_1) meningkat dengan meningkatnya peranan demografi dan modal sosial maka variable tersebut akan berperan secara signifikan sebagai variable langsung ataupun variable yang memediasi demografi dan modal sosial terhadap tingkat partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat. sedangkan (n_2) akan meningkat seiring dengan meningkatnya demografi, modal sosial dan persepsi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama agar dapat mengembangkan tujuan dan metode analisis yang digunakan peneliti sebelumnya.
2. Peneliti selanjutnya harus lebih memahami penggunaan aplikasi smart PLS sebagai alat analisis dalam penelitian.
3. Peneliti selanjutnya harus lebih paham tentang penggunaan analisis statistic dalam angka dalam membangun model hasil penelitian.

5.3.Rekomendasi

Rekomendasi hasil penelitian untuk Balai Besar Taman nasional Bukit Barisan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi kemitraan konservasi pada 9 (Sembilan) kelompok pemegang izin kemitraan konservasi di TNBBS terkait kelembagaannya.
2. Menggunakan model pengembangan kemitraan kehutanan dari hasil penelitian untuk tercapainya tujuan kemitraan kehutanan di TNBBS yaitu kelestarian kawasan sekaligus pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan terciptanya kemandirian masyarakat sekitar kawasan TNBBS
3. Berdasarkan hasil penelitian, demografi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi peserta kemitraan yaitu jarak tempat tinggal dengan lahan garapan sehingga pengelola TNBBS perlu melakukan penentuan batas jarak tempat tinggal pemohon dengan lahan garapan pada zona tradisional TNBBS sebelum mendapatkan izin kemitraan kehutanan,
4. Berdasarkan hasil penelitian, membangun jaringan pemasaran pada variabel modal sosial penting dilakukan. Langkah awal yang perlu dilakukan pengelola TNBBS adalah melakukan pemetaan stakeholder baik dari pemerintahan, swasta, LSM dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan tupoksinya. Hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan peserta kemitraan.
5. Berdasarkan hasil penelitian dalam upaya menguatkan perspsi terhadap peningkatan partisipasi peserta kemitraan kehutanan yang saat ini perlu dilakukan pengelola TNBBS adalah mencari tokoh di masyarakat khususnya pada kelompok kemitraan kehutanan dan membangun komunikasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., Rofatin, B., dan Tedjaningsih, T. 2022. Risiko Produksi Usaha Tani Padi Organik di Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan. *Jurnal Agristan*, 4(1), 94-103.
- Abukari, H., and Mwalyosi, R. B. 2020. Local Communities' Perceptions About the Impact of Protected Areas on Livelihoods and Community development. *Global Ecology and Conservation*, 22. 1-12.
- Aditya, M. F., Abdurrahman, L. dan Mulyana, R. 2020. Pemodelan Nilai Teknologi Informasi Terhadap Performansi Kinerja Karyawan Di PT Carano Integrasi Teknologi Menggunakan Metode Structural Equation Modeling Berbasis Varian. *eProceedings of Engineering*, 7(3), 9651–9660.
- Adnan, H., Berlian, H., Hardiyanto, G., Suwito, dan Sakti, D.K. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Bagi pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*. The Royal Norwegian Embassy, Copyright The Partnership for Governance Reform, 160 hlm.
- Agustina, M., Winarno, G.D. dan Darmawan, A. 2018. Polarisasi Persepsi Para Pihak dalam Pengembangan Hospitalitas Ekowisata di Unit Pengelolaan Wisata Kubu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). *Jurnal Hutan Tropis*. 6 (2). 154-160.
- Al Hakim, R. R. dan Hidayah, H. A. 2022. Pendekatan Structural Equation Modeling untuk Penelitian Pendidikan. *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 1-7.
- Andini, A. 2020. *Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian dengan Word Of Mouth Sebagai Variabel Intervening*. [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 106 hlm.
- Aneng, R.J., Barkey, R.A. dan Salam, M. 2021. Analisis Konflik Tenurial Taman Nasional Bunaken (Studi Kasus Pulau Mantehage). *Jurnal Wasian*, 8(1). 46-57 hlm.
- Anggraeni, M. dan Perdhana, M.S. 2016. Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi , dan Turnover Intention Di PT. Hillconjaya Sakti, Cakung, Jakarta Timur. *Diponegoro Journal Of Management*, 5(4), 1-10.

- Anugrah, D., Muin, A.V.F., Irlan, Tomasina, M.A., Azil, N., Sirimorok, N., Dungga, N.E. and Alam, S. 2022. Injustice against Women in a Social Forestry Program: Case Studies from Two Indonesian Villages. *Journal Forest and Society*. Vol. 6(2): 723-741.
- Anuraga, G., Sulistiyawan, E. dan Munadiroh, S. 2017. Structural Equation Modeling-Partial Least Square untuk Permodelan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya*, Universitas Airlangga, 257 – 263.
- Aspuan, A. dan Nugraha, R.N. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Taman Wisata Alam Telaga Warna Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6593-6598.
- Astuti, N. P. dan Bakri, R. 2021. Pelatihan Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi Smart-PLS 3 Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 613-619.
- Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2020. *Revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung dan Bengkulu Periode 2015-2023*. Lampung: Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 120 hlm.
- Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2022. *Buku Statistik Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2021*. Lampung: Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 110 hlm.
- Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2023. *Buku Statistik Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2022*. Lampung: Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 68 hlm.
- Bakri, S., Qurniati, R., Safe'i, R., dan Hilmanto, R. 2021. Kinerja Modal Sosial Dalam Kaitannya dengan Pendapatan Masyarakat Agroforestry: Studi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(1), 191-203.
- Chin, W. W. 1998. The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295-336.
- Chin, W. 2000. Partial Least Squares for IS Researchers: An Overview and Presentation of Recent Advances Using the PLS Approach. In *ICIS*, 741-742.
- Chiwaya, C. and Mzuza, M. K. 2022. Factors Influencing Community Participation in Forestry Management in Chiradzulu District, Malawi. *Open Journal of Forestry*, 12(2), 177-184.

- Darwin, M., dan Umam, K. 2020. Analisis Indirect Effect Pada Structural Equation Modeling: Studi Komparasi Penggunaan Software Amos dan SmartPLS. *Nucleus*, 1(2), 50-57.
- Deviyanti, D. 2013. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Di Kelurahan Kaang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2). 380-394.
- Dewi, N. A., Rahmawati, R., dan Mukid, M. A. 2015. Analisis Kepuasan Pengunjung Menggunakan Second Order Confirmatory Factor Analysis Pada Structural Equation Modeling (Studi Kasus: Pengunjung Pemandian Air Panas (PAP) Guci). *Jurnal Gaussian*, 4(1), 83-92.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 245-267.
- Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2022. Capaian Perhutanan Sosial Sampai Dengan 1 Oktober 2022. <http://pskl.menlhk.go.id/berita/437-capaian-perhutanan-sosial-sampai-dengan-1-oktober-2022.html>.
- Dunggio, I., dan Gunawan, H. 2009. Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 43-56.
- Dunn, M., Ambrose-Oji, B. and O'Brien, L. 2021. Delivery of Ecosystem Services By Community Woodland Groups and Their Networks. *Forests*, 12(12),1-17.
- Dwiastuti, R. 2017. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-kualitatif*. Universitas Brawijaya Press. 296 hlm.
- Edorita, W. dan Zulwisman. 2021. Pola dan Kebijakan Penyelamatan Perlindungan Satwa Dilindungi Pasca Kebakaran Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo. *Riau Lau Journal*, 5(1). 43-60 hlm.
- Ernawati, A. 2018. Pengaruh Brand Image dan Brand Trust Terhadap Purchase Decision Produk United. *Agora*, 6 (2), 1-6.
- Faizah, O. A. A., Suparti, S., dan Hoyyi, A. 2021. Analisis Technology Acceptance Model Pada Aplikasi Platform Shopee dengan Pendekatan Partial Least Square (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Diponegoro). *Jurnal Gaussian*, 10(3), 423-434.

- Febrina, N., Dewantara, I., dan Anwari, M.S. 2022. Persepsi Masyarakat Dusun Kopian Kecamatan Mandor Terhadap Keberadaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus UNTAN Kabupaten Landak. *Jurnal Hutan Lestari*, 10(3). 536-546.
- Firnanda, E., Harianto, S. P., Winarno, G. D., Wulandari, C., Dewi, B. S., dan Fitriana, Y. R. 2020. Persepsi Masyarakat Daerah Penyangga Terhadap Fungsi Ekologi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(3), 1-10.
- Friedman R.S, Guerrero, A.M, McAllister, R. R. J, Rhodes, J.R., Santika,T., Budiharta, S., Indrawan, T., Hutabarat, J.A., Kusworo, A., Yogaswara, H., Meijaard, E., St. John, F.A.V., Struebig, M.J. and Wilson, K.A. 2020. *Beyond the Community In Participatory Forest Management: A Governance Network Perspective*. Land Use Policy, 97 hlm.
- Garaika dan Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. CV. Hira Tech. 84 hlm.
- Ghozali, I. dan Latan, H. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 310 hlm.
- Gusmiarti, A. 2020. *Penerapan Metode Structural Equation Modeling Pada Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa FMIPA UII Tahun 2018*. [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., and Sarstedt, M. 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Los Angeles: Sage, 290 hlm.
- Hakim, N.L. 2020. Urgensi Revisi Undang Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 43 – 55.
- Hakim, L. Aldianoveri, I., Bangsa, I. K., dan Guntoro, D. A. 2018. Peran dan Dampak Konflik Tenurial Kehutanan Bagi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Cagar Biosfer di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 43-51.
- Hamid, R. S. dan Anwar, S. M. 2019. *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi Dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. Jakarta: PT Inkubator Penulis Indonesia. 187 hlm.
- Hanafiah, H., Sutedja, A. dan Ahmaddien, I. 2020. *Pengantar Statistika*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 1- 162 hlm.

- Harahap, L. K. 2016. Analisis SEM (Structural Equation Modelling) dengan SMARTPLS (Partial Least Square). *Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Walisongo Semarang*, 1(1),1-11.
- Harrison, J. L., Montgomery, C. A. and Jeanty, P. W. 2019. A Spatial, Simultaneous Model of Social Capital and Poverty. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 183-192.
- Hartoyo, D., Pambudi, K. S., dan Putri, E. F. 2020. Kemitraan Konservasi dan Masa Depan Hutan Papua. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 148-157.
- Haryani, R dan Rijanta, R. 2019. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Lindung dalam Program Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(2), 72-86.
- Hu, L. T. and Bentler, P. M. 1998. Fit Indices in Covariance Structure Modeling: Sensitivity to Underparameterized Model Misspecification. *Psychological methods*, 3(4), 424.
- Hussain, D., Abbas, H, and Wang, D. 2021. Contributing Agents for Forest Management of Rural Areas: An Analysis Through Smart PLS Methods. *Journal of Business Strategies*, 15(1), 109-134.
- Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 1990. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 1999. Undang Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2004. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2004 tentang *Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

- Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76 Tahun 2015 tentang *Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/ 2016 tentang *Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang *Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang *Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam* perubahan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang *Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam* jo Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem nomor 2 tahun 2019 tentang *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.
- Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Kehutanan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Jakarta.

- Jabalnur, Heryanti, Safiuddin, S., dan Intan, N. 2023. Kemitraan Konservasi di Hutan Mangrove dalam Zona Pemanfaatan Tradisional. *Halu Oleo Law Review*, 7(1). 52-65 hlm.
- Juniarto, T., Negara, P. P. S. dan Wahyudi, B. 2021. Pengaruh Kinerja Pemasok Terhadap Kinerja Rantai Pasok Menggunakan Metode Structural Equation Modeling (SEM) pada PT. Tiga Serangkai. *Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 6(1), 24-31.
- Kailola, J., Purwanto, R., Sumardi, and Raida L.R.W. 2023. Assessing Social Capital in Community Forest Management in the Mount Hamiding Protection Forest, North Halmahera District, North Maluku, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. 24(1), 431-440.
- Kazungu, M., Zhunusova, E., Kabwe, G., and Günter, S. 2021. Household-Level Determinants of Participation in Forest Support Programmes in the Miombo Landscapes, Zambia. *Sustainability*, 13(5), 1-20.
- Landawati, H.M. 2021. Strategi Pengembangan Perhutanan Sosial Berbasis Analisis SWOT di KTH Tella Serasan KPH Benakat. Skripsi. Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area. 2022. Mengenal Data Demografis, Cara Mendapatkan Serta Contohnya. Universitas Medan Area. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/20/mengenal-data-demografis-cara-mendapatkan-serta-contohnya/>. Diakses 21 Desember 2022. 14.31 WIB.
- Lase, B. D. G., Sujana, S., dan Yusdira, A. 2022. Mengukur Kualitas Layanan Tempat Wisata, Dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Ulang. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, 3(2), 87-106.
- Lestari, S., dan Rahayu, D. L. 2019. Implementasi Model Delone Dan Mclean Terhadap Kesuksesan Penerapan Database Replikasi Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. *Jurnal Cipta Karya Informatika*, 12(1), 1-10.
- Li, X., Wang, S. S. and Wang, X. 2017. Trust and Stock Price Crash Risk: Evidence from China. *Journal of Banking & Finance*, 76, 74-91.
- Lins, K.V., Servaes, H. and Tamayo, A. 2017. Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility During the Financial Crisis. *J Financ* 72 (4): 1785-1824.

- Loli, N., Polii, B.J.V., dan Waalangitan, H.D. 2021. Evaluasi dan Analisis Program Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Bunaken dalam Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang di Desa Poopoh Kabupaten Minahasa. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial dan Ekonomi*, 17(3). 949-960 hlm.
- Luswaga, H. 2023. Non-Timber Forest Products Benefits for Community Groups and Conservation Motivation in Mountains of Tanzania. *Environmental and Sustainability Indicators*, 18. 100238.
- Ma'ruf, A. 2019. Kedudukan Asas Kebebasan berkontrak dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 25(1). 30-45 hlm.
- Marliana, R. R. 2020. Partial Least Square-Structural Equation Modeling Pada Hubungan Antara Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dan Kualitas Google Classroom Berdasarkan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(2), 174-186.
- Martapani, A.N., Fauzi, H., dan Naparin, M. 2021. Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. *Jurnal Rimba Lestari*, 1 (1), 35-46.
- Mia, M. M., Zayed, N. M., Islam, K. M. A., Nitsenko, V., Matushevych, T., and Mordous, I. 2022. The Strategy of Factors Influencing Learning Satisfaction Explored by First and Second-Order Structural Equation Modeling (SEM). *Inventions*, 7(3), 1-13.
- Muhtarom, A., Syairozi, M. I. dan Rismayati, R. D. 2022. Analisis Citra Merek, Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi Minat Beli Pada Umkm Toko Distributor Produk Skincare Kfskin Babat Lamongan. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 36-47.
- Mukti, A. D., Bakri, S., Setiawan, A. dan Lindrianasari, L. 2019. Penggunaan Faktor Sosial Demografi Dan Sikap Kepedulian Pada Lingkungan Sebagai Landasan Dalam Pengembangan Jiwa Entrepreneurship: Studi Di Wilayah Sub Urban Bandar Lampung. *Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek) Ke-4*, 314-322.
- Mulyana, L. 2022. *Analisis Persepsi dan Partisipasi Dalam mendukung Kesejahteraan Petani Melalui Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) Menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) [thesis]*. Bandar Lampung: Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 133 hlm.

- Ojwang, A. 2020. *Community-company Partnership in Forestry in South Africa: An Examination of Trends*. A Report Prepared as Part of the South Africa Country Study for the International Collaborative Research Project Steered by IIED: Instruments for Sustainable Private Sector Forestry. UK Department for International Development and the European Commission, 1-35.
- Okthalamo, V., Iskandar, D.A., dan Masturiatna, A. 2022. Implementasi Program Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 8(2), 111-124
- Pamungkas, W. and Jones, T. E. 2021. Indonesia's Mountainous Protected Areas: National Parks and Nature-Based Tourism. *Nature-Based Tourism in Asia's Mountainous Protected Areas: A Trans-regional Review of Peaks and Parks*, 111-131.
- Pangestika, A. W. 2018. *Persepsi Petani Padi Terhadap Pemanfaatan Kartu Tani Di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan* [thesis]. Yogyakarta: Muhammadiyah Yogyakarta University.
- Prasetya, H.W., Sadono, D., dan Hapsari, D.R. 2023. Dinamika Kelompok dan Kemitraan Konservasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Penyuluhan*, 19(2). 196-211 hlm.
- Pratiwi, M.F., Indah, P.N. dan Yuliati, N. 2022. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Keputusan Konsumen Menggunakan Partial Least Square (PLS) (Studi kasus: Quoka Coffe, Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 9(3), 1042-1054.
- Prayitno, D. E. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184-209.
- Pulungan, W. A., Bakri, S. dan Hilmanto, R. 2015. Telaah Faktor Sosial Demografi Terhadap Kesetujuan Masyarakat Pada Rencana Pengembangan HTR Di KPHP Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(3), 41-50.
- Purwanto, A., Asbari, M. dan Santoso, T. I. 2021. Analisis Data Penelitian Manajemen Pendidikan: Perbandingan Hasil antara Amos, SmartPLS, WarpPLS, dan SPSS untuk Jumlah Sampel Kecil. *International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL)*, 1(1), 111–122.
- Purwatiningsih, S. D. 2022. Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Pada Informasi Konservasi Hutan Dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 110-120.

- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Banuwa, I.S. 2017. Aspek Sosial Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. Vol 5 (3). 95 – 103.
- Qurniati, R., Febryano, I. G. and Zulfiani, D. 2017. How Trust Influence Social Capital to Support Collective Action in Agroforestry development?. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(3), 1201-1206.
- Raharjo, S., Firmansyar, R., Indina, L.A. dan Aliadi, A. 2019. *Laporan Studi Literatur Kemitraan Konservasi Di 12 Taman Nasional*. USAID, 100 hlm.
- Rahayu, E. 2018. *Pengaruh E-service Quality Terhadap E-customer Satisfaction dan E-customer Loyalty pada Toko Online Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna Toko Online Shopee)* [thesis]. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 96 hlm.
- Rahayu, N. S. dan Dewi, B. S. 2022. Pengembangan Potensi Wisata Alam Tnbbs (Study Kasus Resort Balik Bukit) Development Of Natural Tourism Potential Tnbbs (Resort Balik Bukit Case Study). *JOPFE Journal*, 2(1), 1-10.
- Rahayu, S. dan Sari, F. P. 2021. Peningkatan Kemampuan Analisa Data Tugas Akhir Mahasiswa Melalui Pelatihan Program SMARTPLS. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(6), 3576-3590.
- Ramawati, Ekawati, S. dan Kurniasari, D.S. 2022. Bentuk Kelembagaan dan Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanenan Madu Hutan (*Apis dorsata*) di Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 19(1). 1-14 hlm.
- Ristianasari, R., Muljono, P. dan Gani, D. S. 2013. Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 173-185.
- Rochaedi, D.E. Priatna, D. dan Rahayu, S.Y.S. 2021. Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem Sebagai Solusi Konflik Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18 (3). 171-184.
- Roni, S. M., Djajadikerta, H., and Ahmad, M. A. N. 2015. PLS-SEM Approach to Second-Order Factor of Deviant Behaviour: Constructing Perceived Behavioural Control. *Procedia Economics and Finance*, 28, 249-253.

- Roslinda, E., Ekyastuti, W. and Kartikawati, S.M. 2017. Social Capital of Community Forest Management on Nusapati Village, Mempawah District, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(2), 548-554.
- Rukminda, G.M., Soekmadi, R., dan Adiwibowo S. 2020. Perspektif Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Kehutanan Sebagai Solusi Konflik Tenurial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, 25(1). 17-25 hlm.
- Rusmarani, E. 2017. *Hubungan Antara Karakteristik Demografis dengan Perilaku Belanja Masyarakat Di Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang*. [skripsi] Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 1-115 hlm.
- Sadikin, A. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE tentang Kemitraan Konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2). 215-236 hlm.
- Safitri, R.A. 2023. *Karakteristik Demografis Dengan Aspirasi Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Siswa SMA*. [skripsi] Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Safitri, I.M., Herwanti, S., Febryano, I.G., Hilmanto, R., Kuswandono, dan Rusdianto. 2023. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Labuhan Ratu VII Serta Dalam Kemitraan Konservasi Di Taman nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*, 6(2). 147-156 hlm.
- Saipurrozi, M., Febryano, I. G. dan Kaskoyo, H. 2018. Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35-42.
- Sanistasya, P.A., Pratiwi, D.N., Jelita, G., Putra, J.T., Damayanti, A., Suwondo, N., Aransyah, M. dan Zaini, M. 2022. Pelatihan Analisis Kuantitatif Menggunakan Aplikasi Smart PLS dan SEM Amos bagi Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(10), 3787-3792.
- Saputra, J., and Dewata, I. 2019. Tenurial Conflict Between Parties in the Technical Implementation Unit of the Banjar Regency Forest Management Unit in the Province of South Kalimantan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 314(1), p. 012027. IOP Publishing.
- Sarstedt, M., and Cheah, J.-H. 2019. Partial Least Squares Structural Equation Modeling using SmartPLS: a software review. *Journal of Marketing Analytics*, 7, 196–202.

- Sarstedt, M., Ringle, C. M., and Hair, J. F. 2021. Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research*. Cham: Springer International Publishing, 587-632.
- Sholihah, E.U.N. dan Salamah, M. 2015. Structural Equation Modeling-Partial Least Square untuk Pemodelan Derajat Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur 2013). *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 4(2), 2337-3520.
- Situmorang, A., Roslinda, E., dan Hardiansyah, G. 2022. Kemitraan Konservasi sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Rantau Malam. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(1). 169-282.
- Senoaji, G., Anwar, G., Hidayat, M. F., dan Iskandar, I. 2020. Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323-332.
- Sihaloho, L. H. 2016. *Hubungan Iklim Sekolah dan Kematangan Emosional dengan Self Regulated Learning pada Siswa Sma N 1 Stabat*. [Doctoral dissertation]. Medan: Universitas Medan Area).
- Sinthumule, N. I. 2021. An Analysis of Communities Attitudes Towards Wetlands and Implications for Sustainability. *Global Ecology and Conservation*, 27. 1-10.
- Sitorus, R. R. 2022. Peningkatan Kapasitas Dosen Dan Mahasiswa Dalam Pembuatan Artikel Ilmiah Penelitian Di STT Rensus Pematang Siantar. *Ruang Cendekia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 58-65.
- Siwi, W. A. I. D. 2009. *Karakteristik Demografi Sosial Ekonomi Pemulung Berdasarkan Daerah Asal (Studi Kasus Di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)*. [skripsi] Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sofyana, A., Retnowatib, R. dan Istiadib, Y. 2021. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hasil Pinus dan Damar) untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sains Innovare*, 4(1), 6 – 12.
- Sugaepi. 2013. *Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Point Of Reward Dan Sikap Demokratis Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Mata Pelajaran PKN*. [thesis]. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suharjito, D. and Wulandari, C. 2019. A reflection of Social Forestry in 2019: Towards inclusive and collaborative government approaches. *Forest and Society*, 3(1), 137-140.

- Suparyana, P.K., Yakin, A., Amiruddin, Sa'diyah, H., dan Sukardi, L. 2022. Modal Sosial Kemitraan Kelompok Tani Di Kawasan Hutan Rarung Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hutan Tropis*, 10(1), 1-7.
- Suradi, A. dan Windarti, M. W. 2020. Penerapan Model Delone dan Mclean Pada Si-Pmb Online Dari Perspektif Pengguna Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 11(1), 241-248.
- Suriana, Rahmawati, dan Ekawati, D. 2022. Partial Least Square-Structural Equation Modeling pada Tingkat Kepuasan dan Persepsi Mahasiswa terhadap Perkuliahan Online. *SAINTIFIK: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajaranny*, 8(1), 10-19.
- Susanto, L., Yanti, Y., Viriany, V. dan Wirianata, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Uskad. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 124-141.
- Suyono, S., Harahap, R. H., dan Aththorick, T. A. 2017. Persepsi Masyarakat Desa Lae Hole Ii Dalam Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-Cike. *Jurnal Jeumpa* 4(1): 67–79.
- Suyoto, S., Abidin, A. Z., dan Hariyaty, H. 2019. Penerapan Structural Equation Modelling Pada Pelatihan dan Komitmen Organisasi Bidan Puskesmas. *Jurnal Economic Resource*, 2(1), 46-60.
- Syaf, H., Mursidi, B., dan Yasin, A. 2022. Penyelesaian Potensi Konflik Kepentingan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur Dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1041-1060.
- Tambun, S., Heryanto, H., Mulyadi, M., Sitorus, R. R. dan Putra, R. R. 2022. Pelatihan Aplikasi Olah Data SmartPLS Untuk Meningkatkan Skill Penelitian Bagi Dosen Sekolah Tinggi Theologia Batam. *Jurnal Pengabdian Undikma*, 3(2), 233-240.
- Taufik, N. 2020. *Partisipasi Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan Hutan Skema Kemitraan Kehutanan*. [Thesis]: Universitas Tadulako.
- Utami, R.P. dan Ratnaningsih, Y. 2018. Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Silva Samalas*, 1(1). 35-44 hlm.
- Valenzuela, R.B, Yeo-Chang, Y., Park, M. S. and Chun, J. N. 2020. Local people's participation in mangrove restoration projects and impacts on social capital and livelihood: A case study in the Philippines. *Forests*, 11(5), 1-24.

- Wahyuni, A.S. 2022. *Evaluasi Keberhasilan Penerapan E-Learning UIN Suska Riau Menggunakan Model Delone dan MCLean dengan Pendekatan Structural Equation Modelling (SEM)*. [Doctoral dissertation] Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
- Wandira, Y. A., Kaskoyo, H. Febryano, I. G., dan Yuwono, S.B. 2020. Implementasi kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 8(3), 244-250.
- Winarno, G. D., Harianto, S.P., Safei, R., Charles, Y., dan Suratno. 2019. Valuasi Jasa Lingkungan Berbasis Masyarakat di Desa Sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung. *Pusaka Media*. 131 hlm.
- Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun "Organisasi Pembelajaran"*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 38 hlm.
- Wulandari, C., Budiono, P. dan Nurrochmat, D. R. 2016. Kesiapan Daerah dalam Implementasikan Program Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 3(2), 108-117.
- Wulandari, C., Fitriana, Y. R., Febryano, I. G., Herwanti, S., Kaskoyo, H. and Putra, H. J. 2021a. Complexity of Unsolved Forest Tenurial Conflict: A Case of Way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27, 21-21.
- Wulandari, C., Budiono, P., and Iswandar, D. 2021b. Importance of Social Characteristic of Community to Support Restoration Program in Protection Forest. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 8(2), 173-186.
- Wulandari, C., Bakri, S., Riniarti, M., dan Putra, H.J. 2022. Peranan Variabel Demografis, Pemilik Aset, dan Aksesibilitas terhadap Lahan pada Kesetujuan Perambah Pada Rencana Pengembangan Hutan Kemasyarakatan: Studi Di KPH Selagai Linga Lampung Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 10(2), 114-123.
- Wulandari, C., Yuwono, S.B., Bakri, S., Febryano, I.G., Sirait, E.R.N.S., Agustin, Y., Kuswandono, dan Rusdianto. 2023. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kemitraan Konservasi Pemulihan Ekosistem Rawa Bunder di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 2(1), 205-215.
- Yamin, S. 2023. *Olah Data Statistik: SmartPLS 3, SmartPLS 4, Amos dan Stata*. Edisi III. PT. Dewangga Energi Internasional. Bekasi. 753 hlm.

- Yulia, N., Suratman, dan Ritohardoyo, Su. 2014. Pengetahuan Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Berwawasan Lingkungan di Kota Bengkulu. *Majalah Geografi Indonesia*, 28(2), 153-162.
- Yulizar, Y., Hikmat, A. dan Koesmayandi, N. 2014. Konservasi Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*) Berbasis Masyarakat Di Zona Tradisional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Media Konservasi*, 19(2),73-80.
- Zande, R. and Mzuza, M.K. 2022. An Investigation of the Factors Influencing Community Participation in Forest Management: A Case of Balaka District, Malawi. *Journal of Geoscience and Environment Protection*, 10, 84-95.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H. dan Wulandari, C. 2021. Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291-300.
- Zeng, N., Liu, Y., Gong, P., Hertogh, M. and König, M. 2021. Do right PLS and do PLS right: A Critical Review of the Application of PLS-SEM in Construction Management Research. *Frontiers of Engineering Management*, 8, 356-369.
- Zuhdi, Z., Suharjo, B. dan Sumarno, H. 2016. Perbandingan Pendugaan Parameter Koefisien Struktural Model Melalui SEM dan PLS-SEM. *MILANG: Journal of Mathematics and Its Applications*, 15(2), 11-22.